



**PELANGGARAN KESANTUNAN BERBAHASA DALAM  
TALKSHOW *INDONESIA LAWYERS CLUB* EPISODE  
“PERSETERUAN MEGAWATI VERSUS  
JOKOWI MAKIN RUNCING”**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Yasmin Maulina Nabila  
NIM 200110201091**

**PROGRAM STUDI SAstra INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**



**PELANGGARAN KESANTUNAN BERBAHASA DALAM  
TALKSHOW *INDONESIA LAWYERS CLUB* EPISODE  
“PERSETERUAN MEGAWATI VERSUS  
JOKOWI MAKIN RUNCING”**

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Sastra Indonesia

**SKRIPSI**

Oleh

**Yasmin Maulina Nabila  
NIM 200110201091**

**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya;
2. kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang;
3. keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian dan semangat;
4. almamater Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.



**MOTO**

“Bahasa yang baik mencerminkan pikiran yang teratur.”<sup>1</sup>

(Gorys Keraf)

“Janganlah cepat menyerah, sabar dulu, Sang Maha merestuimu.”<sup>2</sup>

(Gustiwiw)

“*No bad results will come from trying your best.*”<sup>3</sup>

(Jaehyun NCT)



---

<sup>1</sup> Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Gusti Irwan Wibowo (Gustiwiw), “Lanjutkan Perjuangan Kita!”, dalam *Duh Gusti*, 2024.

<sup>3</sup> Jaehyun NCT, wawancara penggemar NCT, diakses pada Maret 2026

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yasmin Maulina Nabila

NIM : 200110201091

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow *Indonesia Lawyers Club* Episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2026  
Yang menyatakan,

(Yasmin Maulina Nabila)  
NIM 200110201091

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow *Indonesia Lawyers Club* Episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” telah diuji dan disetujui pada

Hari : Selasa

Tanggal : 21 April 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Tim Penguji

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.  
NIP 196805161992011001

Penguji Utama,

Penguji Anggota,

Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd.  
NIP 196004091985031003

Edy Hariyadi, S.S., M.Si.  
NIP 197007262007011001

Dekan,

Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D.  
NIP 196612211992011001

## RINGKASAN

**Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow *Indonesia Lawyers Club* Episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”** Yasmin Maulina Nabila, 200110201091, 71 halaman; Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jember.

Bahasa memiliki peran sentral dalam komunikasi politik karena tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun citra, menyampaikan kritik, dan memengaruhi audiens. Dalam konteks komunikasi politik, pelanggaran kesantunan tidak hanya menunjukkan ketidaksantunan, tetapi juga digunakan sebagai strategi komunikasi dalam membangun posisi argumentatif. Fenomena tersebut tampak dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” yang membahas konflik politik antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri menjelang Pemilu 2024. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”; dan (2) bagaimana fungsi pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam talkshow tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa 41 tuturan yang mengandung indikasi pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yang dituturkan oleh peserta diskusi, seperti politisi, pengamat politik, pakar komunikasi politik, dan pakar hukum dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Sumber data penelitian adalah tayangan *Indonesia Lawyers Club* yang dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi *Indonesia Lawyers Club*. Data dikumpulkan dengan metode simak dan teknik catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan pragmatis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 41 tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip kesantunan. Berdasarkan bentuk pelanggarannya, ditemukan 14 pelanggaran maksim kebijaksanaan, 2 pelanggaran maksim kedermawanan, 5 pelanggaran maksim kerendahan hati, 10 pelanggaran maksim

pujian, 3 pelanggaran maksim kesepakatan, dan 7 pelanggaran maksim simpati. Pelanggaran maksim kebijaksanaan menjadi bentuk yang paling dominan karena para penutur cenderung menyampaikan kritik, tuduhan, penilaian, dan sindiran secara langsung dalam diskusi politik.

Berdasarkan fungsi pragmatik pelanggaran kesantunan, ditemukan 8 data berfungsi menegaskan diri, 14 data menunjukkan ketidakpuasan, 4 data menunjukkan kekuasaan, 5 data mendelegitimasi lawan, 8 data membangun persepsi kritis dan ketegangan, serta 2 data berfungsi sebagai strategi penghindaran. Fungsi yang paling dominan adalah menunjukkan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diskusi politik, pelanggaran kesantunan banyak digunakan untuk menyatakan kritik, rasa tidak puas, atau keberatan terhadap tokoh, kebijakan, maupun situasi politik yang sedang dibahas. Selain itu, pelanggaran kesantunan dalam wacana politik digunakan secara strategis untuk memperkuat posisi argumentatif dan memengaruhi audiens.

Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidaksantunan dalam arti normatif, tetapi sebagai bagian dari strategi komunikasi dalam wacana politik yang bersifat argumentatif dan konfliktual. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pragmatik serta menjadi bahan pembelajaran mengenai etika berbahasa dalam komunikasi politik.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow *Indonesia Lawyers Club* Episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dan fungsi pelanggarannya dalam diskusi politik pada program *Indonesia Lawyers Club*. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan dalam kajian pragmatik, khususnya yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa dalam media publik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
2. Didik Suharijadi, S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
3. Dr. Agus Sariono, M.Hum. yang pernah menjadi kombi di Program Studi Sastra Indonesia dan telah memberikan arahan kepada penulis pada tahap awal penyusunan skripsi;
4. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Dra. A. Erna Rochiyati, M.Hum. yang pernah menjadi dosen pembimbing anggota penulis dan telah memberikan arahan selama proses awal penyusunan skripsi;
6. Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd. dan Edy Hariyadi, S.S., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini;

7. semua dosen Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan;
8. Drs. Budi Suyanto, M.Hum. yang pernah menjadi dosen wali penulis selama masa perkuliahan;
9. Abu Bakar Ramadhan Muhammad, S.S., M.A. selaku dosen wali penulis;
10. operator Program Studi Sastra Indonesia yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan akademik dan koordinasi selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi;
11. Hadi Misyanto, S.Kom. dan Yuli Yanti, S.Kom., selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta dukungan, perhatian, pengorbanan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Bapak dan Ibu merupakan sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis, yang selalu hadir menguatkan dalam setiap proses, termasuk saat penulis berada pada masa-masa sulit selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik sekarang tanpa perjuangan, ketulusan, dan cinta kasih yang senantiasa diberikan oleh Bapak dan Ibu;
12. Fajar Ali Yafi, S.Tr. Tra., selaku saudara laki-laki penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Meskipun hubungan persaudaraan tidak selalu berjalan dengan tenang dan kerap diwarnai pertengkaran kecil, penulis memahami bahwa di balik semua itu terdapat kepedulian dan dukungan yang tulus. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala usaha yang sedang dan akan kita jalani menjadi jalan untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua;
13. Chaisara Esa Aldama, S.S., Silvia Yunita Putri, S.S., dan Rani Anindya Sani, S.Si., selaku sahabat-sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Jember. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, menemani penulis bertahan di perantauan, serta hadir sebagai teman-teman yang tulus selama menjalani kehidupan

jauh dari rumah. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Firdaini Aulia, S.Pd. dan Putri Fitriani, selaku sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dalam waktu yang panjang dan tetap hadir hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, serta kesediaan menerima berbagai cerita dan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian sangat memahami bagaimana proses ini dijalani, termasuk saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir kehilangan semangat;
15. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian kebahasaan, khususnya di bidang pragmatik.

Jember, April 2026

Yasmin Maulina Nabila  
NIM 200110201091

## DAFTAR ISI

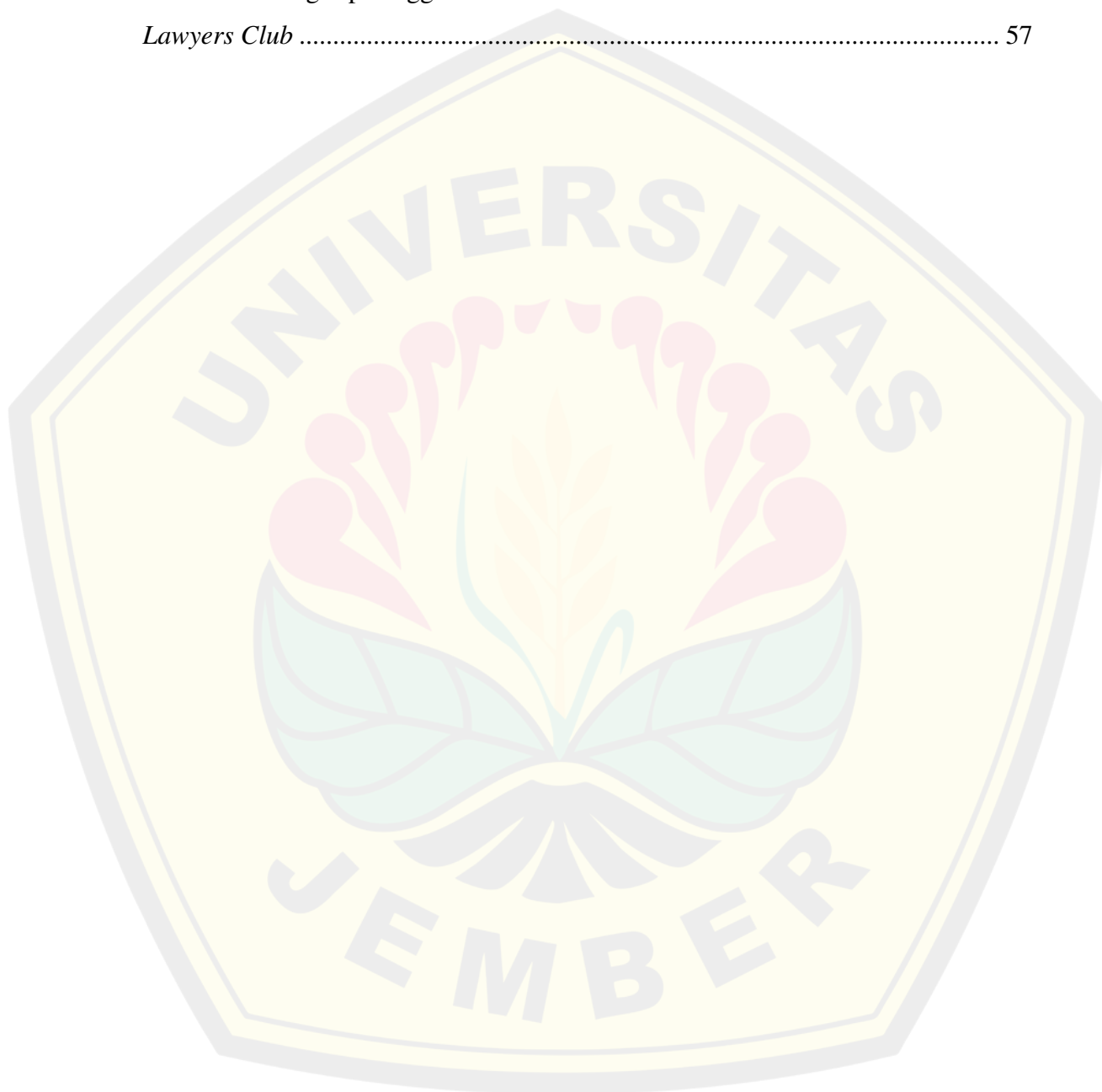
	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>3</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2 Landasan Teori</b> .....	<b>10</b>
2.2.1 Pragmatik .....	10
2.2.2 Aspek Tutur dan Konteks.....	10
2.2.3 Prinsip Kesantunan dalam Pragmatik .....	11
2.2.4 Fungsi Pelanggaran Prinsip Kesantunan .....	14
2.2.5 Komunikasi Politik dan Kesantunan Berbahasa .....	16
2.2.6 Norma Budaya dalam Kesantunan Berbahasa .....	17
2.2.7 <i>Indonesia Lawyers Club</i> .....	18
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
<b>3.1 Data dan Sumber Data Penelitian</b> .....	<b>20</b>
3.1.1 Data Penelitian .....	20
3.1.2 Sumber Data Penelitian.....	21
<b>3.2 Metode dan Teknik Penyediaan Data</b> .....	<b>21</b>
<b>3.3 Metode dan Teknik Analisis Data</b> .....	<b>22</b>

3.4 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data.....	25
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kesantunan Berbahasa .....	26
4.1.1 Maksim Kebijaksanaan .....	27
4.1.2 Maksim Kedermawanan.....	37
4.1.3 Maksim Kerendahan Hati.....	38
4.1.4 Maksim Pujian.....	42
4.1.5 Maksim Kesepakatan .....	49
4.1.6 Maksim Simpati .....	51
4.2 Fungsi Pelanggaran-Pelanggaran Kesantunan Berbahasa.....	56
4.2.1 Menegaskan Diri .....	57
4.2.2 Menunjukkan Ketidakpuasan .....	59
4.2.3 Menunjukkan Kekuasaan .....	61
4.2.4 Mendelegitimasi Lawan .....	62
4.2.5 Membangun Persepsi Kritis dan Ketegangan .....	63
4.2.6 Strategi Penghindaran .....	65
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Implikasi.....	68
5.3 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1** Bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* ..... 27

**Tabel 4.2** Fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* ..... 57



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Indonesia Lawyers Club* (ILC) merupakan salah satu program gelar wicara (talkshow) paling berpengaruh dalam lanskap media massa di Indonesia. Talkshow ini secara konsisten menyajikan debat dan diskusi mendalam mengenai isu-isu krusial. Dipandu oleh jurnalis senior Karni Ilyas, program ini pertama kali disiarkan di stasiun Televisi tvOne pada 13 Agustus 2008 dengan nama *Jakarta Lawyers Club*, sebelum akhirnya berganti nama menjadi ILC dan bermigrasi sepenuhnya ke platform digital YouTube pada 29 Oktober 2021 (Paramitha & Subandi, 2022). Sebagai ruang publik televisual dan digital, ILC menjadi panggung bertemunya berbagai elite politik, akademisi, praktisi hukum, dan pengamat untuk saling beradu argumen. Karakteristik utama program ini adalah atmosfer debat yang dinamis dan konfrontatif sehingga ILC tidak hanya menjadi agen informasi, tetapi juga menjadi barometer tensi politik nasional.

Salah satu episode ILC di kanal YouTube yang menarik perhatian publik adalah episode berjudul “Perseteruan Megawati versus Jokowi Makin Runcing”. Episode ini merekam salah satu momentum politik paling historis pra-Pemilu 2024, yaitu keretakan hubungan ideologis dan personal antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Konteks politik tersebut menjadi konfliktual karena kedua figur sebelumnya berada dalam satu poros kekuasaan selama satu dekade. Dinamika polarisasi ini berdampak langsung pada gaya komunikasi para narasumber yang hadir di studio. Diskusi dalam episode ini tidak hanya diwarnai oleh adu data, melainkan juga dipenuhi oleh tuturan yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa secara masif, seperti kritik verbal yang agresif, sindiran tajam, penggunaan bahasa langsung (*bald on-record*).

Dalam perspektif sosiolinguistik dan pragmatik, bahasa bukan sekadar alat mekanis untuk mentransmisikan informasi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mempresentasikan kekuasaan, menegosiasikan pengaruh, dan menyerang legitimasi lawan (Fairclough, 2013). Agar interaksi sosial dapat berjalan secara

harmonis, penutur idealnya mematuhi prinsip kesantunan. Leech (1993) merumuskan Prinsip Kesantunan (*Politeness Principle*) yang terdiri atas enam maksim interpersonal, yaitu maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), maksim kedermawanan (*generosity maxim*), maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), maksim pujian (*approbation maxim*), maksim kesepakatan (*agreement maxim*), dan maksim simpati (*sympathy maxim*). Watts (2003) menegaskan bahwa ketidaksantunan (*impoliteness*) dalam komunikasi tidak selalu berarti kegagalan interaksi, melainkan sering kali merupakan strategi retorik yang sengaja dipilih penutur untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu dalam situasi yang konfliktual.

Fenomena pelanggaran kesantunan tersebut terlihat jelas dalam salah satu kutipan tuturan Rocky Gerung pada episode ini yang menyatakan:

“Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega adalah orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Itu! Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi”.

Secara pragmatik, tuturan di atas secara eksplisit melanggar maksim pujian (*approbation maxim*) karena memberikan evaluasi negatif yang ekstrem terhadap Presiden Joko Widodo dengan cara membandingkannya secara kontras dengan dua mantan presiden sebelumnya. Pernyataan “Semua itu tidak ada pada Jokowi” bukan hanya sebuah penilaian subjektif, melainkan sebuah strategi pembentukan opini publik untuk mereduksi kredibilitas dan mendelegitimasi kepemimpinan pihak yang dirujuk (Jokowi). Pola komunikasi konfrontatif seperti ini diproduksi secara berulang oleh berbagai narasumber dalam episode tersebut, menjadikan pelanggaran kesantunan sebagai pola dominan dalam membangun posisi argumentatif.

Meskipun penelitian mengenai pelanggaran kesantunan berbahasa dalam program ILC sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti analisis kesantunan pada isu Pilpres atau kasus korupsi tertentu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*state of the art*) yang spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada lokus kontekstualnya, yaitu puncak keretakan hubungan politik Megawati dan Jokowi pra-Pemilu 2024. Ketegangan politik pada episode ini memiliki eskalasi

emosional dan ideologis yang jauh lebih tinggi dibanding episode-episode biasa, sehingga bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan yang muncul diperkirakan memiliki fungsi pragmatik yang lebih kompleks terkait dengan pertarungan kekuasaan dan pembentukan persepsi kritis masyarakat.

Kajian ini dilakukan karena ILC memiliki jangkauan audiensi digital yang luas. Tuturan yang diproduksi oleh para elite dan tokoh publik di media digital tidak hanya mencerminkan etika komunikasi politik mereka, tetapi juga berpotensi memengaruhi cara masyarakat menilai integritas tokoh bangsa, mengadopsi gaya berbahasa, dan menyikapi konflik politik. Oleh karena itu, membongkar fungsi di balik pelanggaran kesantunan dalam wacana politik konfrontatif ini menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar melihatnya sebagai ketidaksantunan normatif, melainkan mampu memahaminya sebagai bagian dari strategi komunikasi politik yang terstruktur. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa berdasarkan keenam maksim kesantunan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”?
2. Bagaimana fungsi pragmatik dari pelanggaran kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh para peserta diskusi dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”.

2. Mendeskripsikan fungsi dari pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam dua aspek, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian linguistik pragmatik, khususnya dalam memahami pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Geoffrey Leech dan dapat menjadi acuan atau referensi dalam menganalisis pelanggaran kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi politik.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak terkait di antaranya sebagai berikut.

###### a. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran tentang penggunaan bahasa dalam konteks diskusi politik dan bagaimana pelanggaran kesantunan dapat terjadi dalam media publik seperti acara debat.

###### b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesantunan berbahasa, terutama dalam diskusi yang melibatkan isu-isu sensitif atau politik, agar dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis.

###### c. Bagi Praktisi Media dan Komunikasi

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi media dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih etis dan santun, khususnya dalam acara debat yang melibatkan tokoh publik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam proses penulisannya, penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang menjadi dasar untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dari tujuan, metode, atau hasil yang diperoleh. Beberapa penelitian terdahulu banyak yang mengkaji topik serupa, tetapi dengan sumber data, tujuan, atau metode yang berbeda. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kontribusi penelitian ini, baik dari segi teori maupun hasil, dan bagaimana penelitian ini memperkaya atau memperluas pengetahuan yang ada.

Pertama, penelitian Putri dkk (2019) berjudul “Penggunaan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam *Talk Show Mata Najwa* Edisi 100 Hari Anies-Sandi Memerintah Jakarta” membahas tentang penggunaan prinsip kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh Najwa Shihab dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam talkshow Mata Najwa. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu dalam penyediaan datanya menggunakan metode simak dan teknik catat, metode analisisnya menggunakan metode padan, serta tidak menggunakan metode pemaparan hasil analisis data. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan penggunaan prinsip kesantunan maksim kebijaksanaan dan maksim kesepakatan, serta adanya pelanggaran prinsip kesantunan maksim kesepakatan, maksim kebijaksanaan, maksim kerendahan hati, dan maksim kedermawanan yang terdapat dalam talkshow tersebut.

Kedua, penelitian Narsiwi dan Ariyana (2018) berjudul “Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan dan Prinsip Kerjasama pada Film *Manusia Setengah Salmon*” membahas tentang bentuk pelanggaran maksim kerjasama dan maksim kesantunan pada dialog film *Manusia Setengah Salmon*. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu dalam penyediaan datanya menggunakan metode simak dan teknik catat, metode analisis datanya menggunakan metode padan, serta tidak menggunakan metode hasil analisis data.

Hasil penelitian tersebut yaitu dalam film tersebut terdapat empat pelanggaran maksim dalam prinsip kesantunan yaitu maksim pujian, maksim kesepakatan, maksim kerendahan hati, dan maksim kebijaksanaan serta ditemukan juga adanya dua pelanggaran maksim dalam prinsip kerjasama yaitu maksim kualitas dan maksim relevansi.

Ketiga, penelitian Ferrika (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Prinsip Kerjasama dan Kesopanan pada Percakapan Cangkrukan di Angkringan Lingkungan Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember” membahas tentang penggunaan dan pelanggaran prinsip kesantunan pada percakapan cangkrukan di Angkringan Lingkungan Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu metode penyediaan datanya menggunakan metode simak dengan teknik simak libat cakap dan teknik lanjutan rekam dan catat, metode analisis datanya menggunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok, serta metode pemaparan hasil analisis datanya menggunakan metode formal dan informal. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat penggunaan keempat maksim dalam prinsip kerjasama dan hanya ditemukan penggunaan lima dari enam maksim prinsip kesantunan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim simpati, dan maksim pujian, serta ditemukan tujuan dari penggunaan maksim-maksim tersebut yaitu untuk menghasilkan komunikasi dua arah yang lancar, untuk menjalin persahabatan yang semakin erat, dan untuk meminimalkan perselisihan.

Keempat, penelitian Sari (2018) berjudul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Acara *Dua Arah* Kompas TV” membahas tentang pelanggaran prinsip kesantunan Leech dalam acara *Dua Arah* Kompas TV. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu metode penyediaan dan pengumpulan datanya menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat, metode analisis datanya menggunakan metode padan, serta tidak menggunakan metode pemaparan hasil analisis data. Hasil penelitiannya yaitu terdapat pelanggaran dari keenam maksim dalam prinsip kesantunan dalam acara tersebut.

Kelima, penelitian Agustina dan Pristiwati (2019) berjudul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Film *Yowis Ben* Karya Bayu Skak” membahas tentang pelanggaran prinsip kesantunan dalam tuturan film *Yowis Ben* karya Bayu Skak. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu metode penyediaan datanya menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik lanjutan rekam dan catat, metode analisis datanya menggunakan metode padan, dan tidak menggunakan metode pemaparan hasil analisis data. Hasil penelitiannya yaitu terdapat pelanggaran kelima maksim dalam prinsip kesantunan, yaitu maksim pujian, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim kebijaksanaan.

Keenam, penelitian Artha (2020) berjudul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Video Keluarga Mak beti pada *Channel* Youtube Arif Muhammad” membahas tentang bentuk dan faktor-faktor pelanggaran prinsip kesantunan dalam video pada *channel* YouTube Arif Muhammad. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu metode penyediaan datanya menggunakan metode simak dan teknik catat, metode analisis datanya menggunakan metode padan, dan metode pemaparan hasil analisis datanya menggunakan metode informal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat banyak pelanggaran prinsip kesantunan dengan pelanggaran maksim pujian yang paling banyak ditemukan dan pelanggaran maksim kerendahan hati yang paling sedikit ditemukan, serta ditemukan lima faktor penyebab pelanggaran prinsip kesantunan tersebut yaitu adanya keinginan mengkritik secara langsung dengan kata-kata kasar, dorongan rasa emosi penutur, protektif terhadap pendapat, sengaja menuduh lawan tutur, dan sengaja memojokkan mitra tutur.

Ketujuh, penelitian Noeraeni (2023) berjudul “Analisis Kesantunan Berbahasa Politikus dalam Program *Indonesia Lawyers Club* di Tv One” membahas tentang penggunaan dan fungsi penggunaan prinsip kesantunan berbahasa yang terdapat dalam acara *Indonesia Lawyers Club* episode “Kepemimpinan di Tengah Krisis”. Penelitian tersebut menggunakan metode dari Sudaryanto yaitu metode penyediaan datanya menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik lanjutan rekam dan catat, metode analisis datanya menggunakan

metode padan, dan tidak menggunakan metode pemaparan hasil analisis data. Hasil penelitiannya yaitu terdapat penggunaan dan pelanggaran prinsip kesantunan dalam tuturan tokoh. Dalam penemuannya, maksim kebijaksanaan merupakan maksim yang paling banyak digunakan dan dilanggar, serta ditemukan juga fungsi tuturan menyatakan yang paling banyak dituturkan dan fungsi tuturan meminta maaf yang paling sedikit dituturkan.

Kedelapan, penelitian Bataona dkk. (2025) berjudul "Strategi Debat Cawapres Indonesia Tahun 2024: Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dan Respon Publik" membahas pelanggaran kesantunan berbahasa dalam debat calon wakil presiden Indonesia tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyimpangan berbahasa, tetapi juga digunakan sebagai strategi untuk menyerang lawan politik, membangun citra diri, dan memengaruhi persepsi publik. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama mengkaji pelanggaran kesantunan dalam konteks komunikasi politik.

Kesembilan, penelitian Hasin dkk. (2020) berjudul "Strategi Tindak Tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional dalam Acara *Dua Arah* Kompas TV" membahas strategi tindak tutur yang digunakan oleh juru bicara politik dalam acara televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan dalam media politik digunakan secara strategis untuk memengaruhi opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik di media tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan tujuan persuasif. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penggunaan bahasa dalam komunikasi politik di media televisi.

Dari kesembilan penelitian yang penulis paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu kesembilan penelitian tersebut juga meneliti prinsip kesantunan dan strategi penggunaan bahasa dalam komunikasi publik maupun politik, kesembilan penelitian tersebut juga menggunakan metode penyediaan data dan metode analisis data dari Sudaryanto, penelitian ketujuh juga menganalisis kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club*, penelitian kedelapan juga meneliti

pelanggaran kesantunan dalam debat politik, serta penelitian ketiga dan keenam juga menggunakan metode pemaparan hasil analisis data.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian pertama sama dengan penelitian ketiga dan keenam menganalisis penggunaan prinsip kesantunan, sedangkan penelitian ini menganalisis pelanggaran prinsip kesantunan, penelitian pertama sama dengan penelitian kedua, keempat, kelima, dan ketujuh tidak menggunakan metode pemaparan hasil analisis data, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pemaparan hasil analisis data, penelitian kedua sama dengan penelitian ketiga meneliti prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan, sedangkan penelitian ini hanya meneliti prinsip kesantunan.

Perbedaan lain yaitu penelitian keenam menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran kesantunan berbahasa, sedangkan penelitian ini menganalisis fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa, penelitian pertama sama dengan penelitian ketiga dan ketujuh meneliti penggunaan prinsip kesantunan, sedangkan penelitian ini meneliti pelanggaran prinsip kesantunan, penelitian ketujuh meneliti tuturan dalam episode “Kepemimpinan di Tengah Krisis”, sedangkan penelitian ini meneliti tuturan dalam episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”, penelitian kedelapan meneliti pelanggaran kesantunan dalam debat cawapres tahun 2024 beserta tujuan dan faktor penyebabnya, sedangkan penelitian ini meneliti pelanggaran kesantunan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club*, serta penelitian kesembilan meneliti strategi tindak tutur juru bicara politik dalam acara televisi, sedangkan penelitian ini meneliti bentuk dan fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa.

Setelah penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pelanggaran prinsip kesantunan telah banyak dilakukan, tetapi belum ada yang menganalisis episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” dari program talkshow *Indonesia Lawyers Club* dan belum ada penelitian yang juga menganalisis fungsi dari pelanggaran kesantunan berbahasa yang ditemukan. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menjadi penelitian pertama yang mengambil sumber data penelitian dari episode tersebut dan melakukan analisis fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pragmatik

Pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang sangat penting. Levinson (2014) dalam bukunya yang berjudul Pragmatik menjelaskan bahwa pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur bahasa dari perspektif eksternal, yaitu bagaimana komponen bahasa digunakan dalam komunikasi. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks penggunaannya.

Pragmatik tidak hanya memperhatikan struktur bahasa itu sendiri, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam situasi tertentu, termasuk interaksi sosial, konteks budaya, serta hubungan antarpenerut dan mitra tutur. Dalam pragmatik, pemahaman terhadap konteks merupakan hal yang sangat penting. Konteks ini meliputi siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan maksud apa.

Menurut Leech (1993:1), pragmatik diartikan menjadi sebuah studi yang mengkaji tentang penggunaan makna dalam linguistik. Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengaruh dari pragmatik, karena seseorang tidak dapat memahami sifat bahasa kecuali harus belajar dan paham tentang pragmatik. Menurut Levinson (2014), pragmatik memiliki sifat yang lebih kompleks, tidak hanya membahas tentang penggunaan bahasa. Dengan kata lain, pragmatik termasuk studi yang berfokus pada hubungan suatu makna dengan konteksnya dan dalam tuturannya memiliki makna yang digunakan pada situasi tertentu.

### 2.2.2 Aspek Tutur dan Konteks

Aspek tutur merupakan salah satu komponen penting dalam pragmatik yang berkaitan dengan bagaimana ujaran atau tuturan dihasilkan dan dimaknai dalam suatu interaksi. Rustono (2020:20) mengungkapkan bahwa Aspek tutur dan konteks adalah dua komponen penting dalam pragmatik yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tindak tutur tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan konteks tempat tindak tutur itu terjadi.

Gumperz dan Hymes (dalam Nadar, 2009:7) memperkenalkan konsep SPEAKING dalam teori aspek tutur, sebuah akronim yang mencakup *setting*, *participants*, *ends*, *act of sequence*, *key*, *instrumentalities*, *norms*, dan *genre*. *Setting* yaitu lokasi, waktu, serta kondisi psikologis dan budaya terjadinya tuturan. *Participants* yaitu individu yang terlibat dalam komunikasi. *Ends* menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu komunikasi. *Act of sequence* menunjukkan bentuk atau urutan tuturan, baik secara lisan maupun tulisan. *Key* menggambarkan nada atau sikap dalam tuturan. *Instrumentalities* merujuk pada sarana atau bahasa yang digunakan. *Norms* mencakup aturan atau norma yang berlaku dalam interaksi. *Genre* merujuk pada jenis tuturan, seperti puisi, surat, atau artikel.

Menurut Leech (1993), konteks adalah komponen penting dalam pragmatik karena makna sebuah tuturan sering kali bergantung pada situasi di mana tuturan itu berlangsung. Tanpa memahami konteks, makna dari sebuah ujaran bisa menjadi ambigu atau bahkan disalahartikan. Konteks mencakup semua informasi eksternal yang mempengaruhi makna ujaran, termasuk situasi komunikasi, hubungan sosial, dan pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur. Konteks membantu menentukan apakah suatu tuturan dianggap sebagai tindak perintah, permintaan, janji, atau bahkan ancaman. Tidak adanya kepekaan terhadap konteks juga dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip kesantunan.

### 2.2.3 Prinsip Kesantunan dalam Pragmatik

Prinsip kesantunan dalam pragmatik adalah konsep yang merujuk pada cara-cara berkomunikasi yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan hubungan interpersonal yang baik dengan cara menghormati dan menghargai perasaan mitra tutur. Prinsip kesantunan ini sering kali digunakan untuk menghindari situasi yang berpotensi menyinggung atau merusak hubungan sosial. Geoffrey Leech adalah salah satu ahli yang memberikan kontribusi besar dalam memahami prinsip kesantunan dalam pragmatik. Dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Pragmatik* (1993), Leech memperkenalkan enam maksim kesantunan yang berfungsi sebagai panduan dalam berkomunikasi.

a. Maksim Kebijaksanaan

Menurut Rahardi (2005:60), maksim kebijaksanaan ialah penutur seharusnya berpatokan pada prinsip agar mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengoptimalkan keuntungan dalam pihak lain saat melakukan kegiatan bertutur. Secara sederhana, maksim ini menekankan pada upaya untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan bagi orang lain. Dalam percakapan, penutur diharapkan untuk lebih memperhatikan kepentingan lawan bicara dan menghindari tindakan yang merugikan mereka.

Maksim kebijaksanaan diekspresikan melalui tuturan yang bersifat impositif atau direktif dan komisif. Tuturan impositif dan komisif merupakan bagian dari klasifikasi tindak ilokusi yang meliputi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak ilokusi direktif atau impositif bertujuan untuk mempengaruhi tindakan mitra tutur, seperti dalam hal memesan, memerintahkan, memohon, meminta, menyarankan, menyuruh menganjurkan, menasihati untuk tindakan yang akan datang, menjanjikan, bersumpah, menawarkan, dan memanjatkan doa.

b. Maksim Kedermawanan

Maksim ini berkebalikan dari maksim kebijaksanaan. Menurut Rahardi (2005:61), maksim kedermawanan ialah penutur diminta untuk menghormati lawan tuturnya dengan meminimalkan keuntungan bagi dirinya dan mengoptimalkan keuntungan untuk pihak lain. Maksim kedermawanan diutarakan dengan tuturan komisif atau impositif.

c. Maksim Pujian

Menurut Wijana (1996:57) maksim pujian ialah maksim yang disampaikan menggunakan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Kalimat ekspresif yaitu kalimat untuk memberikan selamat, terima kasih, pujian, dan ucapan belasungkawa (Nadar, 2009:30). Maksim pujian mengharuskan penutur mengoptimalkan rasa hormat kepada orang lain, serta meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Maksim ini mengarahkan penutur untuk menghindari kritik dan lebih sering memberikan pujian kepada lawan bicara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga

harga diri lawan bicara. Maksim pujian diungkapkan melalui kalimat tuturan yang bersifat ekspresif dan asertif.

Tuturan ekspresif berfungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan, atau memberitahu sikap psikologis penutur terhadap pernyataan yang terkait dengan ilokusi. Contohnya termasuk mengucapkan terima kasih, memuji, menyatakan belasungkawa, dan lainnya. Sedangkan, tuturan asertif melibatkan pembicaraan pada kebenaran proposisi yang diutarakan, seperti menyatakan, mengeluh, menyarankan, melaporkan, dan lain sebagainya.

d. Maksim Kerendahan Hati

Maksim kerendahan hati ialah maksim yang diutarakan dengan kalimat ekspresif dan asertif (Wijana, 1996:58). Bedanya, maksim ini berpusat pada diri sendiri, sedangkan maksim pujian berpusat pada orang lain. Maksim kerendahan hati mewajibkan penutur untuk memaksimalkan ketidak hormatan pada diri sendiri, serta meminimalkan rasa hormat kepada diri sendiri. Maksim ini mendorong penutur untuk merendahkan diri atau mengurangi penghargaan atas dirinya sendiri dan tidak menonjolkan kelebihan pribadi secara berlebihan dalam komunikasi.

e. Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan ialah maksim yang juga diutarakan dengan kalimat ekspresif dan asertif (Wijana, 1996:59). Maksim kesepakatan mengharuskan penutur dan mitra tutur untuk mengoptimalkan kesepakatan di antara mereka, serta mengurangi ketidaksepakatan di antara mereka. Maksim ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan dalam percakapan, menghindari perbedaan pendapat, dan meminimalkan perselisihan untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi.

f. Maksim Simpati

Menurut Leech (1993), maksim simpati ialah penutur diharapkan dapat mengoptimalkan sikap simpati di antara pihak. Maksim ini mengharuskan penutur untuk menunjukkan simpati, dukungan, dan perhatian terhadap perasaan dan kondisi mitra tutur, terutama dalam situasi yang melibatkan emosi. Sikap simpati kepada mitra tutur akan dianggap sebagai tindakan santun. Sebaliknya, tidak

adanya sikap simpati terhadap lawan tutur akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kesantunan.

Maksim ini diungkapkan melalui tuturan asertif dan ekspresif. Maksim simpati menuntut setiap penutur untuk meningkatkan rasa simpati dan mengurangi rasa antipati terhadap mitra tuturnya. Apabila mitra tutur mengalami kesuksesan atau kebahagiaan, penutur sebaiknya mengucapkan selamat. Sebaliknya, apabila mitra tutur mengalami kesulitan atau musibah, penutur diharapkan turut berduka dengan menyampaikan ucapan belasungkawa sebagai tanda simpati.

Kesantunan berbahasa merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan interaksi sosial. Penutur cenderung menggunakan strategi linguistik tertentu untuk mempertahankan hubungan interpersonal dalam komunikasi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Niyasari dkk. (2015) yang menunjukkan bahwa prinsip kesantunan tetap digunakan dalam interaksi sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli di pasar tradisional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya berlaku dalam situasi formal, tetapi juga dalam konteks komunikasi informal.

#### 2.2.4 Fungsi Pelanggaran Prinsip Kesantunan

Pelanggaran prinsip kesantunan dalam suatu tuturan tidak hanya dapat dipahami sebagai penyimpangan dari norma berbahasa, tetapi juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi komunikasi. Dalam situasi tertentu, penutur dapat menggunakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya memperkuat pendapat, mengekspresikan kritik, menunjukkan posisi, menekan lawan bicara, atau membangun efek tertentu di hadapan audiens.

Dalam kajian pragmatik, fungsi suatu tuturan sangat berkaitan dengan konteks penggunaannya. Artinya, satu bentuk tuturan tidak selalu hanya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan, tetapi juga dapat memperlihatkan tujuan komunikatif yang ingin dicapai penutur. Oleh karena itu, pelanggaran kesantunan dapat dipahami bukan hanya dari bentuk penyimpangannya, tetapi juga dari fungsi strategis yang muncul dalam interaksi.

Dalam penelitian ini, fungsi pelanggaran kesantunan tidak diletakkan sebagai kategori yang sepenuhnya baku berdasarkan satu ahli tertentu, melainkan dipahami sebagai kecenderungan fungsi yang muncul dari hasil analisis data. Pengelompokan fungsi tersebut dilakukan dengan melihat hubungan antara tuturan, konteks, arah penilaian, posisi penutur, dan efek pragmatik yang ditimbulkan dalam diskusi politik. Dalam penelitian ini, fungsi pelanggaran kesantunan dijabarkan sebagai berikut.

a. Menegaskan Diri (*Self-Assertion*)

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan penutur untuk memperkuat posisi, keyakinan, atau sudut pandangnya di hadapan audiens. Dalam situasi tertentu, penutur memakai tuturan yang tegas, langsung, atau bernada kuat agar pendapatnya terlihat lebih meyakinkan dan memiliki bobot dalam perdebatan.

b. Menunjukkan Ketidakpuasan (*Expressing Discontent*)

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan untuk mengekspresikan kritik, keberatan, atau kekecewaan terhadap situasi maupun pihak tertentu. Dalam konteks tertentu, tuturan yang bernada keras atau tajam dipakai untuk menunjukkan bahwa penutur tidak menerima keadaan, tindakan, atau kebijakan yang sedang dibahas.

c. Menunjukkan Kekuasaan (*Demonstrating Power*)

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan untuk menampilkan relasi dominasi, posisi kuat, atau otoritas dalam interaksi. Dalam situasi tertentu, penutur memakai tuturan yang menegaskan adanya kuasa pengaruh, atau kemampuan mengendalikan pihak lain dalam percakapan maupun dalam konteks politik.

d. Mendelegitimasi Lawan (*Delegitimizing Opponent*)

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan untuk melemahkan citra, kredibilitas, atau posisi pihak yang dibicarakan dalam situasi tertentu, penutur menyampaikan tuturan yang merendahkan, menolak, atau memberi penilaian negatif agar lawan terlihat lemah di hadapan audiens.

e. Membangun Persepsi Kritis dan Ketegangan (*Creating Tension and Urgency*)

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan untuk memperkuat suasana tegang, krisis, atau konflik dalam diskusi. Dalam situasi tertentu, penutur memakai pilihan kata yang tajam, dramatis, atau menekan agar audiens merasakan adanya urgensi, ancaman, atau ketegangan terhadap isu yang dibahas.

f. Strategi Penghindaran (*Avoidance Strategy*).

Pelanggaran kesantunan dalam fungsi ini digunakan ketika penutur tidak menjawab secara langsung, tetapi mengalihkan, menyamarkan, atau menunda penegasan terhadap isu yang sensitif. Dalam situasi tertentu, strategi ini dipakai untuk menjaga jarak dari pernyataan yang berpotensi kontroversial, sambil tetap mempertahankan arah pembicaraan.

Dengan demikian, fungsi pelanggaran kesantunan dalam penelitian ini dipahami sebagai fungsi strategis yang muncul dalam penggunaan bahasa politik. Pengelompokan fungsi tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa pelanggaran kesantunan dalam data tidak hanya menunjukkan bentuk penyimpangan dari prinsip kesantunan, tetapi juga memperlihatkan tujuan komunikatif tertentu yang dijalankan penutur dalam wacana politik.

### 2.2.5 Komunikasi Politik dan Kesantunan Berbahasa

Komunikasi politik merupakan proses pertukaran informasi yang bertujuan memengaruhi opini publik, sering kali melibatkan strategi penggunaan bahasa untuk menegaskan posisi politik. Cangara (2019) menekankan bahwa gaya komunikasi dalam politik sering kali bersifat persuasif, namun dalam banyak kasus, termasuk diskusi publik, pelanggaran kesantunan dapat menjadi alat untuk mempertegas posisi atau menyerang lawan politik. Oleh karena itu, prinsip kesantunan perlu dianalisis dalam konteks komunikasi politik yang berlangsung di media.

Dalam analisis kesantunan berbahasa, Rustono (2020) menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya sebagai faktor utama yang memengaruhi penerapan dan pelanggaran prinsip kesantunan. Konteks politik,

misalnya, sering kali memperlihatkan dinamika komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan konteks informal atau personal. Dalam situasi politik, bahasa digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat retorika untuk memengaruhi audiens, menunjukkan otoritas, atau membangun citra tertentu.

Rahardi (2005) juga mencatat bahwa pelanggaran kesantunan dalam komunikasi politik sering kali terjadi karena adanya tujuan pragmatis tertentu, seperti untuk mengkritik, menegaskan pendapat, atau bahkan memprovokasi lawan bicara. Oleh karena itu, analisis terhadap pelanggaran kesantunan harus selalu mempertimbangkan faktor tujuan komunikasi serta konteks di mana tuturan tersebut dihasilkan.

#### 2.2.6 Norma Budaya dalam Kesantunan Berbahasa

Norma budaya dalam kesantunan berbahasa sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Rustono (2020) dalam bukunya yang berjudul *Pragmatik* membahas tentang norma-norma kesantunan di Indonesia yang mengacu pada konteks sosial dan budaya. Ia menyoroti bagaimana konsep tepa selira (saling menghormati) menjadi prinsip dasar dalam kesantunan berbahasa di Indonesia. Norma ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik, saling memahami, dan menghargai satu sama lain dalam interaksi sosial. Norma budaya sangat memengaruhi cara kesantunan diterapkan dalam komunikasi.

Namun, ia juga mengakui bahwa dalam situasi yang penuh ketegangan seperti diskusi politik yang melibatkan isu sensitif, norma ini seringkali dikesampingkan atau dilanggar. Salah satu alasan pelanggaran tersebut adalah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti menegaskan pandangan pribadi atau menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan kritik. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap norma kesantunan bisa dipandang sebagai strategi komunikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dampak emosional, menarik perhatian audiens, atau memperkuat argumen yang diajukan.

Dengan demikian, meskipun norma budaya yang mendasari kesantunan berbahasa di Indonesia sangat penting dalam membentuk cara orang berinteraksi, dalam situasi yang penuh ketegangan, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pesan yang lebih jelas atau mempengaruhi audiens dengan cara yang lebih langsung dan emosional.

### 2.2.7 *Indonesia Lawyers Club*

Acara *Indonesia Lawyers Club* dinamakan demikian karena konsep awalnya berfokus pada diskusi hukum yang melibatkan para pengacara (*lawyer*) sebagai narasumber utama. *Club* dalam nama tersebut mencerminkan format acara yang bersifat diskusi terbuka, yang para ahli hukum, pengacara dan tokoh terkait lainnya berkumpul untuk membahas isu-isu hukum dan sosial yang relevan dengan masyarakat Indonesia.

Nama tersebut memberikan kesan bahwa acara ini adalah ruang untuk berkumpulnya para pengacara dan pakar hukum untuk memberikan pandangan dan analisis mereka mengenai berbagai masalah hukum, politik, dan sosial yang sedang berkembang di Indonesia. Walaupun acara ini tidak terbatas hanya pada pengacara, nama *Lawyers Club* tetap dipertahankan untuk menunjukkan ciri khasnya yang menekankan pada sudut pandang profesional dan berbasis hukum dalam setiap pembahasan topiknya.

*Indonesia Lawyers Club* sebagai salah satu program talkshow yang disiarkan di TvOne sebanyak dua kali dalam seminggu secara langsung, dengan format diskusi yang melibatkan sesi balas-membalas argumen antar peserta diskusi. Ini adalah program talkshow yang bersifat interaktif dan dikemas secara apik untuk pemirsanya. Acara ini dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan telah meraih penghargaan bergengsi seperti Panasonic Gobel Awards selama tiga tahun berturut-turut dan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia. Program ini selalu menghadirkan narasumber utama dari sebuah isu yang sedang hangat dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Ciri khas dari program ini adalah membahas tentang hukum dan politik terkini.

Program ini dipandu oleh Karni Ilyas, seorang jurnalis senior yang memiliki latar belakang ahli di bidang hukum dan jurnalistik, serta didukung oleh para pakar sesuai bidangnya. Biasanya narasumber atau peserta diskusi dalam program tersebut yaitu pengacara, polisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), politisi, orang awam, sastrawan dan budayawan, serta pihak-pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Mereka dengan bebas membicarakan peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Hal ini menghasilkan diskusi terbuka di antara mereka dan masyarakat Indonesia.

Oleh karena program ini membahas isu-isu politik dan hukum, di dalamnya banyak digunakan gaya bahasa hukum yang harus jelas, cermat, sederhana, objektif, dan tepat agar mudah dipahami dan tidak rancu. Meskipun bersifat eksplisit dan tegas, bahasa hukum tetap dapat ditafsirkan berbeda. Sering kali, ada celah dalam rumusan hukum yang memungkinkan penegak hukum menafsirkan aturan sesuai dengan konteks atau situasi yang dihadapi (Indrati, 2017:89). Artinya, setiap orang memiliki penafsiran atau pandangan yang berbeda untuk menyimpulkan sesuatu.

### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji bentuk pelanggaran prinsip kesantunan yang meliputi maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati dalam sebuah percakapan pada diskusi di acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Moleong (2021) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan pemahaman, serta menggambarkan situasi secara mendalam dan rinci.

#### 3.1 Data dan Sumber Data Penelitian

##### 3.1.1 Data Penelitian

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data dibagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa tuturan atau ujaran yang melanggar kesantunan berbahasa dalam tayangan tersebut, sedangkan data sekundernya yaitu konteks yang melatarbelakangi tuturan atau ujaran tersebut. Berikut ini merupakan contoh data dalam penelitian ini.

##### **Konteks:**

Percakapan ini dilakukan oleh Deddy dan Karni setelah peserta diskusi lain, Hendri, mengungkapkan pendapatnya bahwa Megawati geram terhadap Jokowi. Deddy kemudian mengajukan diri untuk berbicara.

##### **Tuturan:**

Deddy: “Bang Karni, saya bisa komentar sedikit?”

Karni: “Silahkan.”

Deddy: “Kalau saya, sih, gak setuju judulnya, ya, Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi karena bagi kita ketika Pak Jokowi mengambil jalan

yang berbeda dengan pilihan partai, PDI-Perjuangan, Ibu Mega, dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah *cut loss*, ya. Tidak ada dari sisi PDI-Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai persetujuan dengan Jokowi, yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan....”

### 3.1.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu acara *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” yang dipublikasikan di kanal YouTube resmi *Indonesia Lawyers Club* pada tanggal 31 Juli 2024 dengan durasi tayangan 1 jam 18 menit 53 detik.

Terdapat tiga segmen dalam tayangan diskusi ini dengan narasumber atau peserta diskusi yaitu Deddy Sitorus sebagai politisi PDI-Perjuangan, Emrus Sihombing sebagai pengamat komunikasi politik, Prof. Tjipta Lesmana sebagai pakar komunikasi politik, Abdul Fickar Hadjar sebagai pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan Rocky Gerung serta Hendri Satrio sebagai pengamat politik.

### 3.2 Metode dan Teknik Penyediaan Data

Metode yang digunakan dalam penyediaan data pada penelitian ini yaitu metode simak dengan teknik simak dan teknik lanjutan berupa Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). Teknik ini dipilih karena peneliti hanya berperan sebagai penyimak aktif tanpa terlibat langsung dalam interaksi komunikasi yang sedang berlangsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudaryanto (2015:114), teknik SBLC memungkinkan peneliti untuk menangkap penggunaan bahasa secara alami dalam situasi komunikasi tertentu tanpa mengintervensi jalannya percakapan.

Sumber data utama penelitian ini yaitu episode *Indonesia Lawyers Club* (ILC) berjudul “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Seluruh percakapan dalam video tersebut disimak dengan seksama dan ditranskrip secara verbatim, yaitu kata demi kata, agar tidak ada unsur tuturan yang terlewatkan. Transkrip ini menjadi landasan utama dalam proses analisis. Peneliti melakukan penyimak berulang terhadap episode tersebut untuk memastikan akurasi dalam proses transkripsi dan pemilahan data.

Pemilihan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari menyimak keseluruhan episode, lalu mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian percakapan yang menunjukkan potensi pelanggaran kesantunan. Tuturan yang mengandung indikasi pelanggaran kemudian ditranskrip dan dianalisis secara mendalam berdasarkan teori kesantunan Leech. Kriteria yang digunakan dalam analisis meliputi kategori pelanggaran berdasarkan teori kesantunan Leech, yaitu pelanggaran maksim kebijaksanaan, kedermawanan, kerendahan hati, kesepakatan, simpati, dan pujian. Analisis juga mempertimbangkan konteks percakapan dan intensitas pelanggaran yang terjadi, termasuk situasi debat atau emosi dalam diskusi, serta posisi atau peran komunikator dalam dialog.

Untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap tuturan-tuturan dalam episode tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa artikel berita, referensi ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan tema perbincangan dalam tayangan ILC. Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih transparan, sistematis, dan kontekstual, serta mampu menangkap fenomena pelanggaran kesantunan bahasa secara lebih utuh dan mendalam.

### **3.3 Metode dan Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode padan karena data yang dianalisis berupa tuturan yang berhubungan dengan konteks sosial dan norma kesantunan yang berlaku dalam diskusi publik. Metode padan memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara bahasa dan faktor luar bahasa, seperti hubungan antar penutur, situasi komunikasi, serta intensi komunikasi. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu (PUP), yaitu dengan mengidentifikasi unsur-unsur tuturan yang menjadi ciri pelanggaran. Kemudian, digunakan pula teknik Hubung Banding Membedakan (HBB), yaitu membandingkan tuturan yang dianalisis dengan norma-norma kesantunan yang berlaku dalam teori Leech (1993).

Setiap tuturan dianalisis berdasarkan hubungannya dengan konteks peristiwa komunikasi dalam tayangan *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Proses analisis dilakukan

dengan menjelaskan siapa penutur dan mitra tutur, latar belakang isu yang dibahas, serta bagaimana pilihan kata dalam tuturan berpotensi melanggar prinsip-prinsip kesantunan.

### **Contoh Pelanggaran Maksim Kebijaksanaan**

#### **Konteks:**

Deddy menjawab pertanyaan Karni yang bertanya mengapa Megawati memilih bertemu Kapolri, bukan ketua KPK.

#### **Tuturan:**

Deddy : “Ya, dari penjelasan saya, kan, tadi abang bisa menangkap itu kenapa, kan, KPK ini, kan, yang kita dengar komisioner semua, kan, lepas tangan urusan ini. Kalau abang sambungkan, tuh, dengan pernyataannya si Saut Situmorang soal *remote-meremote*, abang bisa menyimpulkan saya kira.”

Tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan karena Deddy tidak menjawab pertanyaan secara langsung dan menyerahkan simpulan kepada Karni, disertai penyebutan nama dan isu sensitif tanpa kehati-hatian. Sikap tersebut menunjukkan penghindaran tanggung jawab dalam komunikasi dan berpotensi memunculkan penafsiran negatif terhadap pihak yang disebut.

### **Contoh Pelanggaran Maksim Simpati**

#### **Konteks:**

Hendri sedang menyoroti dampak politik atas perpecahan antara Jokowi dan PDI-Perjuangan.

#### **Tuturan:**

Hendri: “Kalau sebuah partai politik tidak bisa mengajukan calon sebesar PDI Perjuangan, maka konotasinya yang akan ada adalah PDI-Perjuangan jatuh pasca Jokowi menyeberang tidak lagi berada di PDI-Perjuangan dan apakah itu akan terus-menerus dilakukan seperti itu? Menurut saya, iya.”

Tuturan tersebut melanggar maksim simpati karena penutur tidak menunjukkan empati terhadap situasi PDI-Perjuangan. Diksi “jatuh” digunakan secara konfrontatif tanpa memberikan ruang bagi kemungkinan pulihnya partai. Narasi negatif tersebut dibiarkan menguat tanpa koreksi atau nuansa keprihatinan sehingga mencerminkan sikap antipati terhadap pihak yang dibahas.

### Contoh Pelanggaran Maksim Kesepakatan

#### Konteks:

Deddy mengakhiri pernyataannya dengan nada emosional terkait arah politik nasional.

#### Tuturan:

Deddy : “Jadi, ini satu situasi yang sangat membahayakan kita semua, membahayakan demokrasi, membahayakan siapapun yang bertentangan dengan nafsu angkara murka penguasa”

Tuturan tersebut menunjukkan pelanggaran maksim kesepakatan karena menggunakan diksi provokatif dan hiperbolik. Alih-alih membangun kesepahaman dalam diskusi, Deddy memilih menyampaikan penilaian ekstrem yang bisa memperlebar konflik persepsi. Kalimat seperti “nafsu angkara murka penguasa” tidak berupaya menjalin keharmonisan atau kesepakatan, melainkan memperkuat kutub oposisi.

### Contoh Pelanggaran Maksim Pujian

#### Konteks:

Prof. Tjipta menyampaikan pendapatnya mengenai situasi politik dan penegakan hukum.

#### Tuturan:

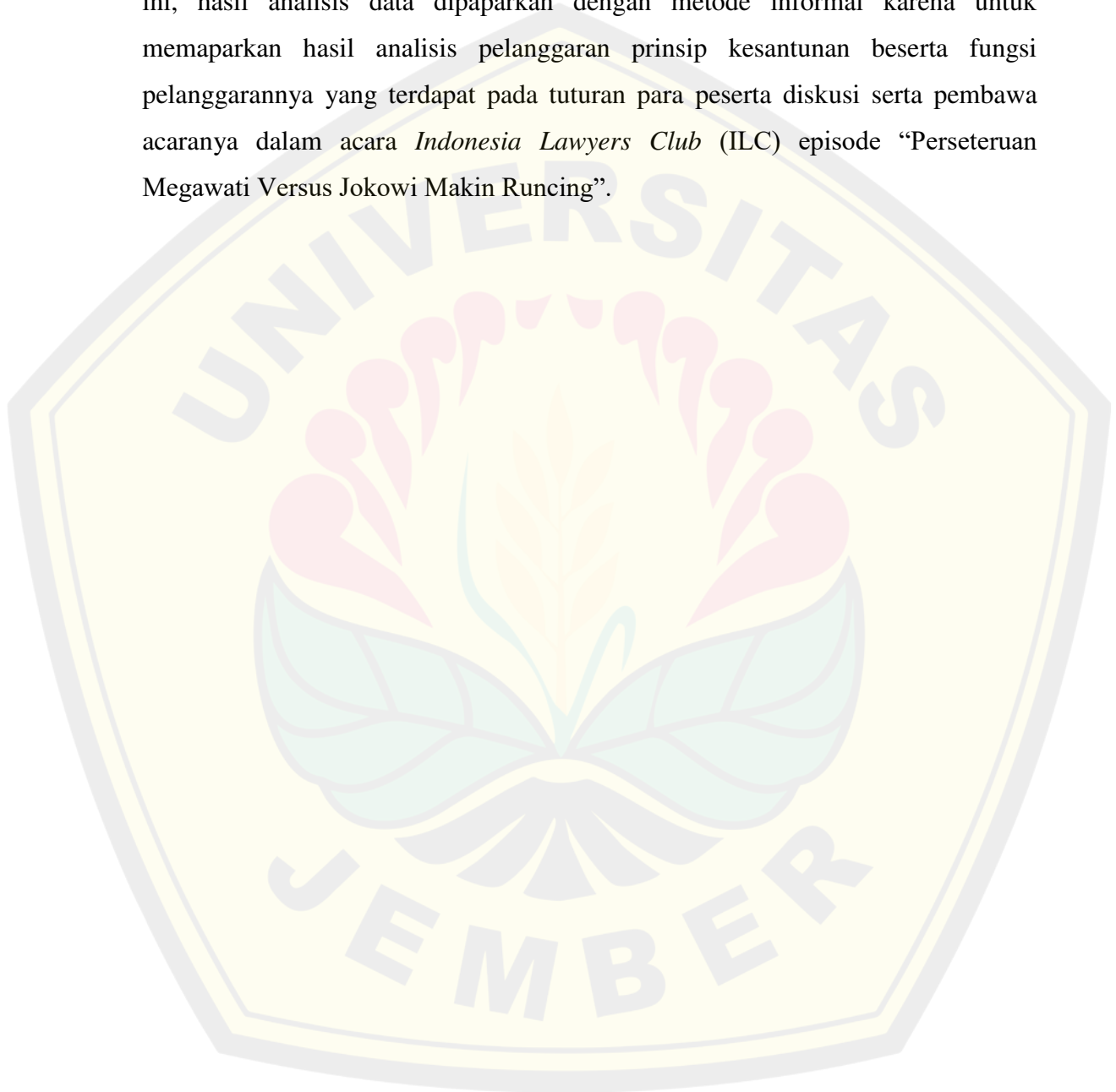
Prof. Tjipta : “Inilah ciri-ciri *failed state*, Bang Karni, negara gagal.”

Tuturan tersebut melanggar maksim pujian karena penutur menyebut Indonesia sebagai *failed state* tanpa menyisipkan apresiasi terhadap pemerintah atau aparat hukum. Pernyataan tersebut bersifat menghakimi dan ekstrem, tanpa nuansa penghargaan sedikit pun sehingga menunjukkan kritik yang sepenuhnya negatif terhadap institusi yang dibahas.

Sebagai bagian dari pemaparan metode, contoh yang disajikan dalam subbab ini terbatas pada empat dari enam maksim kesantunan yang menjadi fokus analisis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran teknik analisis yang digunakan, sementara uraian lengkap seluruh maksim akan dijelaskan lebih rinci pada bab hasil dan pembahasan.

### 3.4 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data

Sudaryanto (2015:123) menjelaskan bahwa dalam pemaparan hasil analisis data, terdapat dua metode, yaitu metode formal dan metode informal. Metode formal untuk memaparkan hasil analisis data dengan lambang-lambang atau kaidah-kaidah formal dalam linguistik, sedangkan metode informal untuk memaparkan hasil analisis data dengan kata-kata atau uraian biasa. Pada penelitian ini, hasil analisis data dipaparkan dengan metode informal karena untuk memaparkan hasil analisis pelanggaran prinsip kesantunan beserta fungsi pelanggarannya yang terdapat pada tuturan para peserta diskusi serta pembawa acaranya dalam acara *Indonesia Lawyers Club (ILC)* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”.



## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap tuturan dalam program *Indonesia Lawyers Club* yang ditayangkan di kanal YouTube tvOneNews, khususnya pada episode berjudul “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Episode ini dipilih karena menampilkan percakapan yang penuh perbedaan pendapat, nada bicara tinggi, dan suasana yang tegang, sehingga relevan untuk dianalisis dari sudut pandang pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa.

Analisis dalam bab ini menggunakan teori kesantunan dari Leech (1993), yang mencakup enam maksim: kebijaksanaan, kedermawanan, kerendahan hati, kesepakatan, pujian, dan simpati. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan yang muncul dalam percakapan antarpartisipan. Untuk memahami fungsi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, penelitian ini menggunakan klasifikasi fungsi pelanggaran kesantunan yang disusun berdasarkan hasil analisis data dan konteks tuturan dalam diskusi politik. Fungsi-fungsi tersebut meliputi menegaskan diri, menunjukkan ketidakpuasan, menunjukkan kekuasaan, mendelegitimasi lawan, membangun persepsi kritis dan ketegangan, serta strategi penghindaran.

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dan fungsi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap bagian dilengkapi dengan kutipan data tuturan, penjelasan konteks, dan analisis berdasarkan teori yang digunakan.

### 4.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kesantunan Berbahasa

Bagian ini membahas jenis-jenis pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa yang ditemukan dalam data, sesuai dengan enam maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Leech (1993). Bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club*

<b>Maksim</b>	<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Jumlah Data</b>
Kebijaksanaan	Evaluatif negatif, pertanyaan retorik, generalisasi, metafora konflik, repetisi, dan hiperbola	14
Kedermawanan	Penonjolan keuntungan diri dan relasi tidak setara	2
Kerendahan Hati	Penegasan diri, evaluasi argumentatif, dan superioritas	5
Pujian	Pelabelan negatif, metafora keras, dan kritik langsung	10
Kesepakatan	Penolakan langsung dan sangkalan tegas	3
Simpati	Dugaan negatif, citra negatif, dan minim empati	7
<b>Jumlah</b>		41

Berdasarkan Tabel 4.1, pelanggaran kesantunan berbahasa dalam penelitian ini ditemukan dalam berbagai maksim kesantunan dengan bentuk pelanggaran yang berbeda-beda. Adapun pembahasan masing-masing pelanggaran tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### 4.1.1 Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan menurut Leech (1993) berkaitan dengan upaya penutur untuk meminimalkan beban terhadap lawan tutur, khususnya dalam interaksi sosial. Penutur harus mempertimbangkan dampak ucapannya agar tidak menimbulkan tekanan atau memperkeruh situasi. Berikut ini disajikan beberapa pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan yang ditemukan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”.

#### **Data (4)**

#### **Konteks:**

Deddy Sitorus menanggapi langkah KPK yang memeriksa istri dari mantan narapidana.

**Tuturan:**

Deddy: “KPK ini melebar lagi ke mana-mana, melebar ke istrinya tersangka yang sudah diadili dan sudah keluar dari penjara. Urusannya apa? kan, gitu, nih.”

Pada tuturan di atas, Deddy menyampaikan kritik terhadap langkah KPK yang memeriksa kembali pihak-pihak terkait dalam kasus Doni, termasuk istri salah satu tersangka yang telah selesai menjalani hukuman. Pernyataan seperti “melebar lagi ke mana-mana” mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena memberikan penilaian negatif terhadap pihak yang dirujuk. Secara linguistik, penggunaan repetisi “melebar” dan pertanyaan retorik “Urusannya apa?” menunjukkan bentuk kritik langsung tanpa mitigasi. Selain itu, pilihan diksi yang digunakan mengandung kesan bahwa tindakan KPK dilakukan secara berlebihan dan kurang memiliki dasar yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tuturan tersebut bersifat evaluatif dan konfrontatif sehingga termasuk pelanggaran maksim kebijaksanaan.

**Data (7)****Konteks:**

Deddy Sitorus menyampaikan pandangannya dengan nada emosional tentang situasi politik yang dinilainya membahayakan demokrasi dan kehidupan berbangsa.

**Tuturan:**

Deddy: “Jadi, ini satu situasi yang membahayakan kita semua, membahayakan demokrasi, membahayakan siapapun yang bertentangan dengan nafsu angkara murka penguasa dan ini bahaya untuk peradaban kita.”

Pada tuturan di atas, Deddy menggambarkan situasi politik sebagai ancaman terhadap demokrasi dan peradaban, serta menyebutkan kalimat “nafsu angkara murka penguasa” untuk menggambarkan kekuasaan yang dianggap bertindak sewenang-wenang. Ungkapan tersebut mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena memberikan penilaian negatif yang kuat. Secara linguistik, penggunaan metafora dan repetisi “membahayakan” menunjukkan intensifikasi retorik. Repetisi tersebut memperbesar efek ancaman dan memperluas jangkauan dampak, mulai dari masyarakat, demokrasi, hingga peradaban. Selain itu, metafora

”nafsu angkara murka” memberi muatan emosional yang tinggi dan membuat kritik terdengar lebih tajam. Tuturan ini bersifat hiperbolik dan menekankan kondisi yang dianggap krisis.

#### **Data (8)**

##### **Konteks:**

Deddy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kader-kader PDI-Perjuangan.

##### **Tuturan:**

Deddy: “*Wallahualam* benar apa tidak, tapi kemarin dengan kejadian tiba-tiba Walikota Semarang kena ya lalu misalnya di Jawa Timur anggota DPRD-nya diambil semua, gubernurnya gak disentuh, ya”

Dalam tuturannya, Deddy menyampaikan dugaan adanya perlakuan yang tidak seimbang dalam penegakan hukum. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena membangun penilaian negatif terhadap pihak yang dirujuk, yaitu aparat atau proses penegakan hukum. Secara linguistik, bentuk perbandingan ”anggota DPRD-nya diambil semua, gubernurnya gak disentuh” menimbulkan kesan adanya ketimpangan perlakuan. Meskipun diawali dengan ungkapan ”*Wallahualam* benar apa tidak”, bagian setelahnya justru mengarahkan pendengar pada dugaan tertentu. Dengan demikian, tuturan ini bersifat insinuatif karena penilaian negatif tidak dinyatakan secara langsung sebagai tuduhan, tetapi dibangun melalui perbandingan dan penekanan pada perbedaan perlakuan. Karakter tuturan seperti ini tetap menunjukkan potensi penyudutan.

#### **Data (11)**

##### **Konteks:**

Deddy Sitorus mengeluhkan adanya tekanan terhadap kader PDIP agar tidak bersuara lantang di ruang publik.

##### **Tuturan:**

Deddy: “Kami sangat merasakannya bagaimana anggota-anggota DPR kami diminta tidak bicara, jangan terlalu keras, jangan begini, jangan begitu.”

Pada tuturan di atas, Deddy menggambarkan adanya tekanan terhadap kader partainya agar membatasi sikap dan pernyataan mereka di ruang publik. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena menghadirkan penilaian negatif terhadap pihak yang diasumsikan membatasi kebebasan berbicara. Secara linguistik, tuturan ini ditandai oleh repetisi larangan "jangan terlalu keras, jangan begini, jangan begitu" yang memperkuat kesan adanya tekanan yang berulang. Penggunaan kata ganti "kami" juga menempatkan penutur sebagai bagian dari kelompok yang merasa mengalami perlakuan tersebut. Dengan susunan seperti itu, tuturan ini bersifat keluhan langsung yang sekaligus menyudutkan pihak lain sebagai sumber tekanan politik. Tuturan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra bahwa ada intervensi terhadap kebebasan berbicara kelompok tertentu.

**Data (12)**

**Konteks:**

Deddy Sitorus menanggapi pertanyaan Karni Ilyas mengenai alasan Megawati menemui Kapolri, bukan Ketua KPK.

**Tuturan:**

Deddy: "Ya, dari penjelasan saya, kan, tadi abang bisa menangkap itu kenapa, kan, KPK ini, kan, yang kita dengar komisioner semua, kan, lepas tangan urusan ini. Kalau abang sambungkan, tuh, dengan pernyataannya si Saut Situmorang soal *remote-meremote*, abang bisa menyimpulkan saya kira."

Dalam percakapan di atas, terlihat Deddy tidak menjawab pertanyaan Karni secara langsung, tetapi malah mengarahkan Karni untuk menyimpulkan sendiri jawabannya. Sikap tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran langsung terhadap pertanyaan, yang mungkin menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap permintaan informasi yang diajukan Karni. Deddy seolah-olah mengatakan "Jawabannya sudah jelas, Anda harus menyimpulkannya sendiri", yang dapat terasa kurang bijaksana atau bahkan merendahkan posisi Karni sebagai penanya. Dengan tidak memberikan jawaban secara langsung, Deddy dapat dianggap tidak memberikan informasi yang cukup secara jelas dan sopan. Oleh

karena itu, tuturan tersebut dapat termasuk dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan.

**Data (17)**

**Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana menanggapi pernyataan Deddy Sitorus dalam diskusi mengenai pemeriksaan sejumlah menteri oleh aparat penegak hukum.

**Tuturan:**

Prof. Tjipta: “Beberapa waktu yang lalu kita lihat sejumlah Menteri dalam kabinet masih aktif dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dipanggil oleh KPK, diperiksa, katanya ada masalah, dua kali diperiksa macam-macam, setelah itu gak ada kabarnya lagi, tetep gitu, ya.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kebijaksanaan karena penutur tidak meminimalkan dampak negatif terhadap pihak yang dibicarakan, yaitu aparat penegak hukum. Pernyataan bahwa para menteri ”dua kali diperiksa” tetapi ”gak ada kabarnya lagi” memberi kesan adanya ketidakjelasan proses hukum. Pilihan kata ”macam-macam” dan ”gak ada kabarnya lagi” bernada menyindir sehingga memperkuat citra negatif terhadap kinerja aparat. Dalam konteks pemeriksaan pejabat oleh Kejaksaan Agung atau KPK yang berkaitan dengan transparansi, penutur tidak mempertimbangkan kemungkinan alasan prosedural atas belum diumumkan hasilnya pemeriksaan. Dengan demikian, tuturan ini menonjolkan sisi negatif institusi secara langsung sehingga melanggar maksim kebijaksanaan.

**Data (25)**

**Konteks:**

Emrus Sihombing menjelaskan posisi aparat penegak hukum dalam proses pemanggilan hukum serta relasi kuasa yang terjadi di dalamnya.

**Tuturan:**

Emrus: “Secara juridis formal, kalau kita diundang bisa tidak datang, awas hati-hati karena kekuasaan di tangan siapa? Tentu di tangan penegak hukum, kan, bukan di tangan yang diundang.”

Pada tuturan di atas, penutur secara langsung memberi peringatan yang berkonotasi ancaman seperti “awas hati-hati”. Kalimat tersebut mengabaikan kenyamanan mitra tutur atau pihak yang menjadi contoh dan menempatkan posisi mereka dalam ketakutan atau tekanan hukum. Penutur tidak mempertimbangkan kepentingan atau keuntungan pihak lain, justru menekankan kekuatan pihak penegak hukum sehingga tuturan tersebut dapat termasuk ke dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan. Penggunaan peringatan tersebut menunjukkan bahwa penutur lebih menekankan potensi kerugian yang dapat dialami pihak lain dibanding upaya meminimalkan dampak negatif dalam komunikasi.

**Data (26)****Konteks:**

Emrus Sihombing menyampaikan bahwa tidak ada tokoh publik yang berani menyatakan perbedaan pendapat terhadap pemerintah, kecuali pihak tertentu.

**Tuturan:**

Emrus: “Semua tidak ada yang berani, tuh, ngomong berbeda pendapat dengan pemerintah, yang berhadapan dengan pemerintah gak ada yang berani.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kebijaksanaan karena penutur tidak meminimalkan dampak negatif terhadap pihak lain. Pernyataan “semua tidak ada yang berani” merupakan generalisasi yang memberi penilaian negatif terhadap banyak pihak, seperti tokoh publik, akademisi, maupun kelompok masyarakat lain, sehingga mereka seolah tidak berani menyampaikan perbedaan pendapat terhadap pemerintah. Dalam konteks politik Indonesia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Namun, pernyataan bahwa “tidak ada yang berani” secara tidak langsung menyudutkan banyak pihak. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim kebijaksanaan karena menonjolkan kerugian bagi pihak lain melalui penilaian yang bersifat menyeluruh dan bernada negatif.

**Data (28)****Konteks:**

Tuturan ini disampaikan oleh Hendri yang membahas tentang PDI-Perjuangan yang dinilai tidak patuh, khususnya Ibu Megawati.

**Tuturan:**

Hendri: "...PDI-Perjuangan, partai yang besar, ya, tapi ketumnya gak bisa diatur,..."

Pada tuturan di atas, ungkapan "gak bisa diatur" memuat penilaian langsung terhadap tokoh yang dibicarakan. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena menghadirkan citra negatif berupa kesan keras kepala atau sulit diarahkan. Secara linguistik, ungkapan "gak bisa diatur" bersifat evaluatif karena tidak netral dan langsung menilai tokoh yang dimaksud. Meskipun tuturan diawali dengan pengakuan bahwa PDI-Perjuangan adalah "partai yang besar", fokus utamanya justru bergeser ke penilaian negatif terhadap ketua umumnya. Oleh karena itu, karakter tuturannya bersifat langsung dan menyerang. Tuturan ini membentuk evaluasi yang cenderung merugikan citra pihak yang dibicarakan.

**Data (32)****Konteks:**

Hendri Satrio menanggapi dinamika politik terkait penolakan wacana tiga periode dan menyebut Megawati sebagai pihak yang memulai konflik.

**Tuturan:**

Hendri: "Ya, saya ulang lagi yang pertama kali mengibarkan bendera perang itu adalah Bu Mega karena menolak tiga periode."

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kebijaksanaan karena memosisikan pihak yang dibicarakan sebagai pemicu konflik politik. Secara linguistik, penggunaan metafora "mengibarkan bendera perang" memberi nuansa pertentangan dan konfrontasi yang kuat. Pilihan kata tersebut tidak netral dan cenderung menyudutkan. Penolakan terhadap wacana tiga periode tidak lagi digambarkan sebagai sikap politik biasa, tetapi sebagai tindakan yang mengawali konflik. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat dramatik dan menyudutkan.

Metafora tersebut juga memberbesar efek konflik dalam tuturan sehingga kritik terdengar lebih tajam daripada pernyataan faktual biasa.

**Data (33)****Konteks:**

Hendri Satrio menyatakan bahwa Megawati merupakan satu-satunya ketua umum partai yang tidak tunduk kepada Jokowi dalam hubungan politik nasional.

**Tuturan:**

Hendri: "...Ibu Mega adalah satu-satunya ketum parpol yang tidak bisa ditundukkan sampai hari ini."

Pada tuturan di atas, kata "ditundukkan" memiliki makna kuat yang menggambarkan adanya upaya menekan atau menguasai sehingga menimbulkan kesan bahwa Jokowi memperlakukan ketua-ketua partai lain secara tidak setara. Hal ini tidak hanya merugikan citra Jokowi sebagai tokoh yang sedang atau pernah menjabat sebagai presiden, tetapi juga merendahkan ketua umum partai lain seolah mereka telah patuh tanpa perlawanan. Kalimat tersebut disampaikan secara langsung tanpa ungkapan yang memperhalus makna, seperti "terkesan" atau "seolah-olah" sehingga terdengar seperti tuduhan yang tegas. Gaya penyampaiannya yang keras dan tanpa kehati-hatian menunjukkan bahwa penutur tidak menjaga rasa hormat terhadap pihak lain. Oleh karena itu, tuturan tersebut dapat dikatakan melanggar maksim kebijaksanaan karena tidak menjaga nama baik atau martabat tokoh yang disebutkan.

**Data (34)****Konteks:**

Deddy Sitorus menyampaikan kritik terhadap kondisi sistem pemerintahan yang dinilainya telah mengalami penyimpangan serius.

**Tuturan:**

Deddy: "Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya, *no one*, gak ada, Pak."

Pada tuturan di atas, Deddy menyebutkan bahwa hampir semua aspek pemerintahan dipelintir sesukanya. Tuturan tersebut merujuk pada sistem

pemerintahan di masa pemerintahan Jokowi. Dalam tuturannya, Deddy lebih menekankan pada ketidakpercayaan dan kritik terhadap sistem pemerintahan. Pernyataan “dipelintir sesukanya” secara langsung menyiratkan bahwa segala hal dalam republik ini telah dicoreng atau dirusak tanpa adanya solusi atau alternatif yang membangun. Oleh karena itu, tuturan di atas merupakan pelanggaran maksimal kebijaksanaan karena pernyataannya tidak bijak dan merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tanpa menawarkan cara-cara untuk memperbaikinya.

### **Data (38)**

#### **Konteks:**

Rocky Gerung mengkritik Jokowi terkait kebijakan mutasi dan reposisi jabatan dalam pemerintahan.

#### **Tuturan:**

Rocky: “yang sekarang orang persoalkan itu bahwa Jokowi melakukan mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi, segala macam itu.”

Pada tuturan di atas, Rocky menyampaikan kritik terhadap kebijakan mutasi dan reposisi jabatan yang dikaitkan langsung dengan Jokowi. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksimal kebijaksanaan karena menyampaikan evaluasi negatif secara langsung terhadap tokoh yang dibicarakan. Secara linguistik, ungkapan “tanpa berpikir” dan “sesuka-sukanya” menempatkan tokoh yang dirujuk sebagai pihak yang bertindak sewenang-wenang dan kurang mempertimbangkan fungsi kelembagaan negara. Selain itu, rangkaian “mutasi, reposisi, segala macam itu” memperkuat nada penilaian dan memperpanjang efek kritik. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat evaluatif, langsung, dan menyerang. Tuturan ini tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga membentuk citra negatif terhadap cara pengambilan keputusan tokoh yang dibicarakan.

**Data (39)****Konteks:**

Rocky Gerung membahas kemungkinan posisi politik Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada Oktober 2024.

**Tuturan:**

Rocky: “Jadi, siapa yang lagi dalam keadaan *fearful*, ya, Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya, mungkin Oktober itu *he’s nothing* itu, *gonna be nothing* itu.”

Pada tuturan di atas, Rocky menyampaikan penilaian yang langsung diarahkan pada posisi politik Jokowi setelah masa jabatannya berakhir. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan karena memuat evaluatif negatif yang merendahkan tokoh yang dibicarakan. Secara linguistik, ungkapan “*he’s nothing*” dan “*gonna be nothing*” menunjukkan bentuk evaluasi langsung yang menihilkan arti atau pengaruh tokoh tersebut. Tuturan ini juga didahului oleh kata “*fearful*” dan “cemas” yang membangun citra psikologis bahwa tokoh tersebut berada dalam kondisi tertekan. Dengan susunan seperti itu, karakter tuturannya bersifat konfrontatif, merendahkan, dan menyerang secara verbal. Efek pragmatik dari tuturan ini bukan hanya kritik politik, tetapi juga pelemahan citra personal tokoh yang dirujuk.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim kebijaksanaan dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penggunaan diksi evaluatif negatif,
2. pertanyaan retorik,
3. generalisasi,
4. metafora konflik,
5. repetisi, dan
6. hiperbola.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim kebijaksanaan dalam data penelitian cenderung hadir melalui tuturan yang bersifat langsung, menilai, menyindir, atau menyudutkan pihak yang dibicarakan.

#### 4.1.2 Maksim Kedermawanan

Maksim kedermawanan menurut Leech menekankan agar pembicara lebih banyak menguntungkan orang lain dan mengurangi keuntungan bagi diri sendiri. Dalam percakapan, seseorang yang mematuhi maksim ini seharusnya mengurangi tuntutan atau ekspektasi terhadap orang lain dan lebih memfokuskan pada memberikan keuntungan pada memberikan keuntungan kepada mereka.

#### **Data (3)**

##### **Konteks:**

Deddy Sitorus menjelaskan situasi politik seputar pemeriksaan terhadap ajudan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

##### **Tuturan:**

Deddy: “Diperiksa lagi entah siapa lagi, bahkan mencekal ajudannya Mas Hasto yang mungkin bahkan gak punya paspor, gak pernah mimpi ke luar negeri yang uang di dalam rekening banknya juga cuma 400 ribu, 700 ribu.”

Pada tuturan di atas, Deddy menyampaikan kritik terhadap proses hukum yang menimpa ajudan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, dengan menyebut bahwa ajudan tersebut dicekal padahal “tidak punya paspor” dan hanya memiliki “uang di rekening bank 400 ribu, 700 ribu”. Pilihan kata tersebut menunjukkan upaya merendahkan martabat seseorang dengan mengekspos kondisi ekonomi yang memprihatinkan secara publik. Oleh karena itu, tuturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap maksim kedermawanan karena Deddy mengkritik keuangan atau keadaan finansial seseorang yang masih belum tentu kebenarannya. Hal tersebut dapat dianggap meremehkan atau mengejek keadaan seseorang tanpa mengetahui kebenarannya.

#### **Data (27)**

##### **Konteks:**

Hendri Satrio membandingkan posisi Jokowi dengan ketua umum partai lain dalam relasi kekuasaan politik nasional.

##### **Tuturan:**

Hendri: “Ketum-ketum parpol yang lain tunduk pada dirinya, pada diri Pak Jokowi maksud saya.”

Pada tuturan di atas, Hendri merendahkan integritas para ketua partai lain selain PDI-Perjuangan dengan mengatakan mereka “tunduk” tanpa bukti atau elaborasi. Kata “tunduk” sangat konfrontatif dan menyinggung harga diri pihak yang disebut. Tuturan tersebut menyiratkan ketua-ketua partai lain selain PDI-Perjuangan tidak independen. Dalam tuturannya, sama sekali tidak ada upaya untuk menyampaikan secara halus, berimbang, atau simpatik seperti mengganti kata “tunduk” yang berkonotasi negatif menjadi “sejalan” yang lebih netral dan deskriptif, serta menggunakan kata “tampak” dan “kecenderungan” awalan untuk menandakan bahwa yang diungkapkan adalah pengamatan pribadi, bukan tuduhan langsung. Oleh karena itu, tuturan tersebut dapat termasuk dalam pelanggaran maksim kedermawanan.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim kedermawanan dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penyebutan kondisi pribadi secara terbuka,
2. penggunaan diksi evaluatif yang merendahkan,
3. penilaian langsung terhadap pihak lain, dan
4. penonjolan relasi yang tidak setara dalam tuturan.

Ciri-ciri tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran maksim kedermawanan dalam data penelitian tidak hanya muncul melalui isi tuturan, tetapi juga melalui cara penutur membingkai pihak lain di ruang publik. Dalam hal ini, tuturan cenderung menghadirkan pihak yang dibicarakan sebagai pihak yang lemah, bergantung, atau kurang berdaya, sehingga karakter tuturannya bersifat merendahkan dan membuka ruang penilaian negatif terhadap pihak tersebut.

#### 4.1.3 Maksim Kerendahan Hati

Maksim kerendahan hati dalam prinsip kesantunan Leech menekankan agar penutur tidak terlalu mengagung-agungkan diri sendiri atau pihak yang terkait dengannya, serta menghindari pernyataan yang menunjukkan superioritas atau kekuasaan yang berlebihan. Penutur diharapkan menunjukkan kerendahan hati dalam mengungkapkan perasaan atau posisinya.

**Data (6)****Konteks:**

Deddy menjelaskan reaksi Megawati terhadap isu yang dikaitkan dengan sikap para komisioner KPK.

**Tuturan:**

Deddy: “Makanya, Ibu Mega langsung bicara “Eh! Lo Rossa!” gitu karena apa? semua komisioner KPK yang kita tahu mengatakan “Oh, tidak. Tidak ada urusan” gitu.”

Pada tuturan di atas, Deddy mengutip secara langsung reaksi Megawati dengan gaya yang ekspresif, lalu membandingkannya dengan sikap para komisioner KPK yang disebut “tidak ada urusan”. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kerendahan hati karena menempatkan Megawati sebagai pihak yang lebih tegas, lebih paham situasi, dan lebih berani dibanding pihak lain yang dibicarakan. Secara linguistik, bentuk kutipan langsung “Eh! Lo Rossa!” memberi efek dramatik dan memperkuat penonjolan sikap Megawati dalam percakapan. Selain itu, kontras antara respons Megawati dan respons komisioner KPK membangun hierarki simbolik antara pihak yang dianggap aktif dan pihak yang dianggap pasif. Dengan demikian, karakter tuturan ini bersifat ekspresif dan berpihak, karena meninggikan satu pihak secara terbuka dalam forum diskusi publik.

**Data (10)****Konteks:**

Deddy Sitorus menyampaikan pandangannya mengenai situasi politik yang membatasi kebebasan berpendapat menjelang pergantian pemerintahan.

**Tuturan:**

Deddy: “Sudah benar-benar yang namanya *Republic of Fear* tadi sudah terjadi. Tidak banyak lagi orang yang berani bersuara dan saya kira saya gak tahu mudah-mudahan Oktober mimpi buruk ini berakhir ya atau ya gak tahu apakah akan diestafetkan juga?”

Tuturan tersebut melanggar maksim kerendahan hati. Dalam tuturannya, Deddy menunjukkan dirinya dan pihaknya sebagai pihak yang paling berani berbicara dalam situasi yang ia sebut sebagai *Republic of Fear*. Dengan menyatakan

bahwa “tidak banyak lagi orang yang berani bersuara”, ia secara tidak langsung memosisikan dirinya sebagai salah satu dari sedikit orang yang berani melawan kekuasaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan maksim kerendahan hati karena Deddy meninggikan dirinya sendiri dan memberikan kesan bahwa pihaknya lebih berani dan lebih sadar terhadap situasi politik dibandingkan pihak lain.

**Data (20)****Konteks:**

Abdul Fickar sedang menjelaskan perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan, serta menekankan bahwa banyak orang yang tidak memahami hal tersebut.

**Tuturan:**

Fickar: “yang kedua, itu tadi saya bilang kalau penyidikan itu ada puncaknya, ya, artinya gini, kalau penyidikan itu sudah mendengarkan saksi, ahli, surat, dan segala macam. Kalau tidak ditemukan buktinya kurang atau ternyata peristiwanya adalah peristiwa perdata, maka di ujungnya adalah SP3. Nah, SP3 pasti semua sudah tahu Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Itu ada ujungnya gitu artinya dihentikan, tapi kalau memang ada buktinya, lanjutkan ke pengadilan, dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan. Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak mengerti, nah, sedangkan di penyelidikan itu tidak ada ujungnya.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kerendahan hati karena penutur secara tidak langsung menempatkan dirinya pada posisi yang lebih mengetahui dibanding pihak lain. Pernyataan “itu yang kadang-kadang orang tidak mengerti” menunjukkan penilaian bahwa masyarakat kurang memahami proses hukum yang dijelaskan. Dalam diskusi publik mengenai hukum, penjelasan memang diperlukan. Namun, penekanan bahwa “orang tidak mengerti” dapat memberi kesan merendahkan atau meremehkan kemampuan pihak lain. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim kerendahan hati karena secara tidak langsung menunjukkan posisi intelektual yang lebih tinggi dibanding pihak lain.

**Data (24)****Konteks:**

Emrus Sihombing menjelaskan temuan disertasinya untuk memperkuat pendapat bahwa komunikasi privat cenderung lebih jujur dibanding publik.

**Tuturan:**

Emrus: “Dalam doktor saya, ketika orang melakukan komunikasi di ruang privat itu kecenderungan akan ada keterbukaan...”

Pada tuturan di atas, Emrus menyebut secara langsung “Dalam doktor saya” ketika menjelaskan pendapatnya. Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kerendahan hati karena penutur menampilkan latar belakang akademiknya secara terbuka sebagai dasar untuk memperkuat pendapat yang sedang disampaikan. Secara linguistik, penyebutan langsung terhadap capaian akademik pribadi berfungsi sebagai penanda otoritas diri. Bentuk ini tidak sekadar menghadirkan informasi, tetapi juga menempatkan penutur sebagai pihak yang memiliki legitimasi pengetahuan lebih tinggi dibanding pihak lain dalam diskusi. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat afirmatif dan menonjolkan otoritas intelektual penutur.

**Data (41)****Konteks:**

Rocky Gerung mengomentari isu dugaan upaya melemahkan PDIP dan mengaitkannya dengan Jokowi.

**Tuturan:**

Rocky: “Jadi, kita ada di situ dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel.”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kerendahan hati karena penutur membangun penilaian yang menempatkan pihak yang dibicarakan dalam posisi lebih rendah, sekaligus menampilkan dirinya sebagai pihak yang lebih memahami situasi politik. Ungkapan “anak kecil” dan “hanyalah membuat mebel” secara linguistik berfungsi sebagai diksi yang merendahkan karena mengecilkan kapasitas tokoh yang dibicarakan. Di sisi lain, ungkapan “pelajaran ini mau kita terangkan pada publik” menempatkan penutur dalam posisi sebagai pihak yang memberi penjelasan, seolah-olah memiliki pemahaman yang lebih benar dibanding publik maupun tokoh yang dikritik. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat

merendahkan sekaligus menonjolkan posisi intelektual penutur. Tuturan ini tidak hanya menyerang pihak lain, tetapi juga memperkuat citra penutur sebagai pihak yang lebih mampu membaca realitas politik.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim kerendahan hati dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penonjolan posisi intelektual penutur,
2. penyebutan otoritas atau latar belakang pribadi secara langsung,
3. perbandingan yang meninggikan satu pihak dan merendahkan pihak lain,
4. penggunaan diksi yang menampilkan kesan superioritas, dan
5. penegasan diri dalam forum publik.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim kerendahan hati dalam data penelitian cenderung muncul melalui tuturan yang tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membangun posisi penutur atau pihak yang dibelanya sebagai pihak yang lebih unggul, lebih paham, atau lebih berotoritas dibanding pihak lain.

#### 4.1.4 Maksim Pujian

Maksim pujian dalam prinsip kesantunan Leech mengharuskan penutur untuk meminimalkan penghinaan atau kritikan terhadap orang lain dan memaksimalkan pujian. Ketika seseorang melanggar maksim ini, ia cenderung mengekspresikan kritik, penghinaan, atau komentar negatif tanpa menunjukkan penghargaan atau pujian terhadap pihak yang terkait.

#### **Data (5)**

##### **Konteks:**

Deddy Sitorus mengkritik tindakan aparat hukum, khususnya KPK, yang menurutnya tidak serius dan hanya mengada-ada.

##### **Tuturan:**

Deddy: “Ini, kan, semua dagelan hukum yang dilakukan oknum-oknum KPK...”

Pada tuturan di atas, Deddy menyampaikan kritik terhadap tindakan aparat hukum dengan menyebutnya sebagai “dagelan hukum”. Tuturan tersebut

mengandung pelanggaran maksim pujian karena menonjolkan citra negatif pihak yang dibicarakan melalui ungkapan yang merendahkan. Secara linguistik, kata “dagelan” memiliki konotasi lelucon atau sesuatu yang tidak serius, sehingga ketika dilekatkan pada proses hukum, maknanya berubah menjadi bentuk evaluasi yang meremehkan. Pilihan diksi ini bukan hanya mengkritik tindakan tertentu, tetapi juga membangun kesan bahwa proses hukum yang dilakukan tidak layak dipandang serius. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat evaluatif, sarkastik, dan menyerang citra institusi yang dirujuk.

**Data (9)****Konteks:**

Deddy Sitorus menyampaikan pandangannya mengenai situasi politik nasional dinilai penuh tekanan dan ketakutan di bawah pemerintahan yang sedang berkuasa.

**Tuturan:**

Deddy: “Kita gak akan tahu sampai kapan ini, mungkin sampai Oktober atau kemudian ini duplikasi menjadi sebuah kelaziman karena pada hari ini republik kita ini sudah menjadi *Republic of Fear* (Republik Ketakutan).”

Dalam tuturannya, Deddy tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan label negatif terhadap situasi politik dengan menyebutnya sebagai *Republic of Fear*. Frasa tersebut sangat kuat dan memiliki konotasi yang serius, yaitu bahwa negara saat ini dikuasai oleh ketakutan dan tekanan politik yang ekstrem. Dalam maksim pujian, penutur seharusnya meminimalkan celaan terhadap orang lain, tetapi dalam tuturannya Deddy justru memberikan celaan secara jelas tanpa menyisipkan hal positif mengenai pihak yang ia kritik sehingga tuturan tersebut dapat dianggap melanggar maksim pujian.

**Data (15)****Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana menafsirkan pernyataan seorang tokoh sebagai strategi komunikasi berbasis ketakutan dan mengkritik klaimnya terkait pendirian KPK.

**Tuturan:**

Prof. Tjipta: “Itu mungkin juga betul untuk melancarkan *fear arousing communications*, komunikasi yang membangkitkan rasa takut

‘Awas, loh, Kapolri! Jangan coba-coba! Saya bisa ini!’ lalu dikatakan ‘Jangan lupa ya KPK ini saya yang dirikan!’.”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim pujian karena penutur membangun citra negatif terhadap tokoh yang dibicarakan melalui penafsiran atas gaya komunikasinya. Secara linguistik, penggunaan istilah “*fear arousing communications*” menempatkan pernyataan tokoh tersebut sebagai komunikasi yang bertujuan membangkitkan rasa takut. Selain itu, pengulangan bentuk kutipan seperti “Awas, loh, Kapolri! Jangan coba-coba!” memberi efek dramatis dan mempertegas gambaran bahwa komunikasi tersebut bersifat menekan. Tuturan ini tidak menghadirkan penghargaan terhadap tokoh yang dibicarakan, melainkan langsung mengarahkan pendengar pada citra negatif tertentu. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat evaluatif, interpretatif, dan menurunkan citra pihak yang dirujuk.

**Data (19)**

**Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana memberikan kesimpulan secara tajam mengenai kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia.

**Tuturan:**

Prof. Tjipta: “Inilah ciri-ciri *failed state*, Bang Karni, negara gagal.”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim pujian karena penutur memberikan penilaian negatif yang sangat luas terhadap kondisi negara. Secara linguistik, istilah “*failed state*” atau “negara gagal” merupakan label evaluatif yang sangat berat karena merujuk pada negara yang dianggap tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya secara baik. Ungkapan ini tidak diarahkan pada suatu kebijakan atau peristiwa tertentu, tetapi pada kondisi negara secara umum. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat menyeluruh, tajam, dan menurunkan citra negara serta pemerintah secara langsung. Tuturan ini menunjukkan bentuk kritik yang tidak lagi terbatas pada evaluasi kebijakan, tetapi sudah mengarah pada penilaian menyeluruh terhadap kondisi kenegaraan.

**Data (23)****Konteks:**

Tuturan ini muncul saat membahas kekalahan aparat penegak hukum dalam sidang praperadilan dan dampaknya terhadap penilaian kinerja mereka.

**Tuturan:**

Fickar: “Ketika sebuah lembaga penegakan hukum dipraperadilan dan kalah itu konsekuensinya besar. Artinya, pekerjaan penegak hukum yang dipraperadilan itu tidak sesuai standar, gitu. Artinya, kerjanya main-main.”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim pujian karena penutur menonjolkan kekurangan aparat penegak hukum secara langsung. Ungkapan ”kerjanya main-main” secara linguistik merupakan bentuk evaluasi negatif yang sederhana, tetapi sangat kuat, karena memberi kesan bahwa pekerjaan aparat dilakukan secara tidak serius dan tidak profesional. Ungkapan tersebut tidak sekadar mengkritik hasil kerja, tetapi juga menurunkan citra profesional pihak yang dibicarakan. Selain itu, susuna penjelasan sebelum ungkapan itu, yaitu ”tidak sesuai standar”, memperkuat arah penilaian negatif yang sudah dibangun. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat langsung, evaluatif, dan merendahkan citra aparat penegak hukum.

**Data (30)****Konteks:**

Hendri Satrio berasumsi bahwa terdapat pihak-pihak yang berusaha mengurangi kekuatan politik PDI-Perjuangan secara sistematis.

**Tuturan:**

Hendri: “Jadi, mulai dari hari ini dipereteli, lah, kemampuan PDI-Perjuangan berpolitik.”

Dalam tuturan di atas, penutur menggunakan diksi “dipereteli” yang memiliki konotasi negatif dan merendahkan. Kata tersebut menggambarkan proses penghancuran atau pelemahan yang dilakukan secara sistematis terhadap partai, seolah-olah PDI-Perjuangan sedang dilucuti kekuatannya secara sengaja. Tuturan tersebut tidak disertai pengakuan terhadap sejarah, pencapaian, atau kapasitas partai

dalam menghadapi tantangan politik, khususnya menjelang Pilkada Jakarta. Tidak ada nada apresiatif atau netral dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tuturan tersebut jelas melanggar maksim pujian karena hanya menonjolkan kelemahan tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap aspek positif partai tersebut.

**Data (35)****Konteks:**

Deddy Sitorus menjawab pertanyaan mengenai apakah Jokowi menjadi ancaman bagi PDI-Perjuangan saat ini.

**Tuturan:**

Deddy: “Ancaman? Kita terbiasa dengan ancaman, bukan kita PD, Pak, tapi seaneam-aneamanya dia, dia makan nasi juga, kok. Dia juga punya rasa takut. Emangnya kita juga gak tahu apa yang di sana yang miring-miring? Punya, Pak, sabar aja.”

Pada tuturan di atas, Deddy menyampaikan bahwa Jokowi bukanlah ancaman yang perlu ditakuti oleh PDI-Perjuangan. Pernyataan “dia makan nasi juga” dan “dia juga punya rasa takut” menunjukkan bahwa Jokowi diposisikan setara atau bahkan lebih rendah dari yang lain, tanpa penghormatan terhadap jabatannya sebagai seseorang yang sempat menjadi kepala negara. Kata “yang miring-miring” juga menyiratkan tuduhan negatif dan merendahkan tanpa bukti konkret. Tuturan tersebut secara jelas melanggar maksim pujian karena penutur tidak memberikan penghargaan atau pengakuan atas posisi maupun capaian Jokowi, melainkan justru menyampaikan tuturan yang merendahkan.

**Data (36)****Konteks:**

Rocky Gerung menanggapi isu hubungan politik antara Jokowi dan Megawati, serta membandingkannya dengan citra politik SBY.

**Tuturan:**

Rocky: “Satu keterangan yang bagus diucapkan oleh Deddy tadi bahwa tidak ada poin untuk mengatakan Megawati berseteru dengan Jokowi itu karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati, kan, itu rasanya. Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi,

ini orang yang kena cemburunya sendiri. Dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat.”

Pada tuturan di atas, Rocky menyampaikan bahwa Jokowi merasa cemburu terhadap reputasi historis Megawati dan reputasi demokratis dari SBY, serta menggambarkan bahwa Jokowi bingung sendiri mencari cara agar dikenang oleh masyarakat. Tuturan tersebut secara jelas menampilkan Jokowi sebagai tokoh yang kurang menonjol dari segi sejarah dan kepemimpinan, tanpa memberikan pengakuan atas sisi positif apa pun darinya. Pernyataan seperti “kena cemburunya sendiri” dan “bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat” mengandung makna merendahkan yang dapat mencoreng citra seorang pemimpin negara. Oleh karena itu, tuturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap maksim pujian karena penutur tidak menunjukkan sikap menghargai atau menghormati, melainkan menonjolkan sisi negatif secara sepihak.

**Data (37)****Konteks:**

Rocky Gerung membandingkan peran politik Megawati, SBY, dan Jokowi dalam sejarah demokrasi Indonesia.

**Tuturan:**

Rocky: “Apapun Ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan orde baru. Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega adalah orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi itu. Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi.”

Pada tuturan di atas, Rocky menyampaikan bahwa Megawati dikenang sebagai tokoh yang melawan Orde Baru dan memahami pentingnya pembatasan kekuasaan, serta SBY dipuji karena membawa citra positif Indonesia di mata internasional sebagai negara demokratis. Namun, Rocky kemudian menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimiliki oleh Jokowi. Pernyataan ini menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang tidak memiliki kontribusi penting dalam demokrasi maupun sejarah politik nasional tanpa menyebutkan sisi positif darinya. Kalimat “semua itu tidak ada pada Jokowi” bernada merendahkan, sehingga berpotensi mencoreng citra Presiden sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu, tuturan tersebut merupakan

pelanggaran terhadap maksim pujian karena lebih menonjolkan kekurangan pihak lain secara sepihak.

#### **Data (40)**

##### **Konteks:**

Rocky Gerung membahas hubungan politik Megawati dengan Jokowi dan para pejabat pemerintahan.

##### **Tuturan:**

Rocky: “Nah, bagi Megawati, ada film bilang begini *“I know what you did in last summer”*, “saya tahu yang lo lakukan di musim panas yang lalu, tuh”, siapa yang dia maksud? Jokowi, petinggi-petinggi negara, kalangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas Mega ngerti di kepalanya itu dia ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya itu. Jadi, kalau mau adu-adu perspektif, ya, karena itu mungkin Mega bilang “Eh! Lo kecil, tuh, gak ada apa-apanya. *You are peanuts*”, gitu, kan.”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim pujian karena penutur membangun citra yang sangat negatif terhadap pihak-pihak yang dibicarakan melalui serangkaian ungkapan yang merendahkan. Secara linguistik, ungkapan “ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan” dan “Dia tahu siapa penjahatnya itu” membentuk gambaran bahwa pejabat yang dirujuk terlibat dalam kejahatan negara. Sementara itu, ungkapan *“You are peanuts”* merupakan bentuk evaluasi langsung yang mengecilkan nilai atau arti pihak yang dibicarakan. Pilihan bahasa seperti ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menghadirkan penghinaan simbolik dalam tuturan politik. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat sarkastik, merendahkan, dan menyerang citra pihak yang dirujuk secara terbuka.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim pujian dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penggunaan diksi evaluatif negatif,
2. pelabelan yang merendahkan,
3. perbandingan yang menonjolkan kekurangan pihak lain,
4. metafora atau ungkapan bernada keras, dan
5. penilaian langsung terhadap citra pihak yang bicarakan.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim pujian dalam data penelitian cenderung muncul melalui tuturan yang secara terbuka menekankan kelemahan, kekurangan, atau citra negatif pihak lain tanpa menghadirkan penilaian yang berimbang.

#### 4.1.5 Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan menurut prinsip kesantunan Leech menuntut penutur untuk memaksimalkan kesepakatan dengan mitra tutur dan meminimalkan ketidaksetujuan. Dengan kata lain, jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan, hal itu seharusnya disampaikan secara halus dan dengan cara yang menghindari konflik terbuka.

#### **Data (2)**

##### **Konteks:**

Percakapan terjadi antara Deddy Sitorus dan Karni Ilyas setelah muncul pernyataan bahwa Megawati dan Jokowi berseteru.

##### **Tuturan:**

Deddy: “Bang Karni, saya bisa komentar sedikit?”

Karni: “Silahkan.”

Deddy: “Kalau saya, sih, gak setuju judulnya, ya, Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi karena bagi kita ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai, PDI-Perjuangan, Ibu Mega, dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah *cut loss*, ya. Tidak ada dari sisi PDI-Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi, yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan....”

Pada tuturan di atas, Deddy menyampaikan ketidaksetujuannya secara langsung terhadap narasi yang menyebutkan adanya persetujuan antara Megawati dan Jokowi. Pernyataan seperti “Saya, sih, gak setuju judulnya” dan “Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak” menunjukkan penolakan langsung terhadap pendapat yang sebelumnya disampaikan oleh peserta diskusi lain. Hal ini menunjukkan bahwa Deddy tidak berusaha untuk menjaga kesepahaman atau titik temu dalam diskusi, melainkan mempertegas perbedaan pandangan secara frontal.

Oleh karena itu, tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kesepakatan karena disampaikan dengan cara yang meminimalkan persetujuan dan cenderung menolak sudut pandang pihak lain secara terang-terangan.

### **Data (13)**

#### **Konteks:**

Percakapan terjadi saat Karni Ilyas meminta penegasan atas pernyataan Deddy Sitorus terkait isu “*remote*” dalam konteks hubungan politik dan kekuasaan.

#### **Tuturan:**

Karni: ”Jadi, kira-kira *remote*-nya ada di Trunojoyo maksudnya?”

Deddy: “Nah, itu kesimpulan abang, saya gak mengiyakan.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim kesepakatan karena penutur tidak berupaya membangun keselarasan dengan lawan bicara. Ketika diminta penegasan, Deddy tidak menyatakan setuju atau tidak setuju secara jelas, melainkan menjawab “saya gak mengiyakan”. Jawaban ini menolak persetujuan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks diskusi politik yang sensitif, respons tersebut menunjukkan sikap menjaga jarak dari pernyataan yang berpotensi kontroversial. Namun, dari sudut pandang kesantunan, penutur tidak memaksimalkan kesepahaman dalam percakapan. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim kesepakatan karena mempertahankan ketidaksepakatan secara tersirat.

### **Data (16)**

#### **Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana menyanggah klaim bahwa Megawati adalah pendiri KPK.

#### **Tuturan:**

Prof. Tjipta : “KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan. Itu rentetan dari Tap MPR Nomor 11 MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN,....”

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran maksim kesepakatan karena penutur secara langsung menyatakan ketidaksepakatan terhadap klaim yang sedang dibahas. Bentuk penolakan terlihat jelas pada pengulangan kata ”bukan” dalam

kalimat "KPK bukan didirikan oleh Megawati, bukan". Secara linguistik, pengulangan tersebut berfungsi sebagai penegasan dan membuat posisi penutur terdengar lebih tegas dalam menyangkal pernyataan sebelumnya. Setelah menyampaikan penolakan, penutur memang menghadirkan argumen berupa rujukan Tap MPR, tetapi bagian awal tuturannya sudah lebih dulu menunjukkan bantahan yang kuat. Dengan demikian, karakter tuturannya bersifat menyangkal secara langsung dan argumentatif. Tuturan ini tidak diawali dengan strategi untuk mencari persamaan pendapat, tetapi langsung menempatkan posisi penutur berseberangan dengan klaim yang dibahas.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim kesepakatan dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penolakan langsung terhadap pendapat lawan tutur,
2. penggunaan bentuk sangkalan yang tegas,
3. pengembalian penafsiran kepada lawan tutur, dan
4. penegasan posisi penutur melalui pernyataan argumentatif.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim kesepakatan dalam data penelitian cenderung muncul melalui tuturan yang mempertahankan perbedaan pandangan secara terbuka, baik dalam bentuk bantahan langsung maupun penolakan tersirat terhadap kesimpulan lawan bicara.

#### 4.1.6 Maksim Simpati

Maksim simpati menurut prinsip kesantunan Leech menganjurkan agar penutur memaksimalkan simpati terhadap mitra tutur atau pihak yang sedang dibahas, serta meminimalkan antipati atau sikap yang dapat dianggap tidak empatik.

#### **Data (1)**

#### **Konteks:**

Deddy Sitorus menyebut adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak luar terhadap KPK.

**Tuturan:**

Deddy : "...Makanya, waktu itu, Bang Saut Situmorang di kursi ini menyatakan bahwa KPK itu *di-remote*. Artinya, dikendalikan dari luar, ya, *toh?*"

Pada tuturan di atas, Deddy tidak menunjukkan rasa hormat atau empati terhadap KPK sebagai lembaga independen negara. Sebaliknya, ia menyampaikan tuduhan serius yang menyiratkan bahwa KPK tidak lagi memiliki otonomi dan telah menjadi alat pihak eksternal. Tuduhan tersebut dapat merusak citra lembaga, menimbulkan ketidakpercayaan publik, serta menyakiti pihak-pihak yang terlibat secara profesional di dalamnya. Penggunaan istilah "*di-remote*" juga memperkuat kesan bahwa KPK hanyalah boneka yang dikendalikan kekuatan lain, tanpa memberikan ruang klarifikasi atau pembelaan. Oleh karena itu, tuturan tersebut melanggar maksim simpati karena disampaikan tanpa mempertimbangkan etika empatik terhadap institusi dituju dan dapat memperburuk persepsi publik secara sepihak.

**Data (14)****Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana menanggapi reaksi Megawati yang dianggap emosional dalam menyikapi situasi hukum yang menjerat tokoh-tokoh dari PDI-Perjuangan.

**Tuturan:**

Prof. Tjipta: "Mungkin juga ibu makin ketakutan. Ketakutan nanti Hasto kena, keserempet ibu barangkali. Saya katakan barangkali, tapi apa tujuannya sampai keluar pernyataan yang keras itu sampai "Nanti saya datang Kapolri!" gitu ya."

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim simpati karena penutur tidak menunjukkan empati terhadap pihak yang dibicarakan. Ungkapan "makin ketakutan" dan "keserempet ibu barangkali" menggambarkan Megawati dalam posisi panik dan defensif, sehingga memberi kesan negatif terhadap motif dan emosinya. Dalam konteks politik yang sensitif, terutama terkait proses hukum, pernyataan yang bernuansa dugaan seperti ini dapat memperburuk citra pihak yang dibicarakan. Penutur tidak berupaya menampilkan sikap simpati atau penghargaan, tetapi justru menonjolkan kemungkinan rasa takut sebagai dasar tindakan. Dengan

demikian, tuturan ini melanggar maksim simpati karena tidak memaksimalkan rasa empati terhadap pihak lain, melainkan menguatkan penilaian negatif secara terbuka.

#### **Data (18)**

##### **Konteks:**

Prof. Tjipta Lesmana menanggapi isu pemanggilan sejumlah menteri dan menyinggung adanya kecurigaan publik.

##### **Tuturan:**

Prof. Tjipta : “Kenapa dipanggil? Orang curiga. *Wallahualam* sampai di mana kebenaran. Orang curiga ini ada orderan menterinya mau dipaksa bla, bla, bla, bla, gitu, lah.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim simpati karena penutur tidak menunjukkan empati terhadap pihak yang dibicarakan, yaitu aparat penegak hukum. Penyebutan adanya ”orderan” dan dugaan pemaksaan memperkuat kecurigaan bahwa pemanggilan menteri tidak dilakukan secara wajar. Pernyataan ini membangun persepsi negatif tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa proses tersebut berjalan sesuai prosedur hukum. Dalam konteks politik Indonesia, pemanggilan pejabat oleh aparat hukum sering menimbulkan spekulasi. Namun, penutur tidak berupaya meredam kecurigaan tersebut atau menunjukkan sikap memahami posisi institusi hukum. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim simpati karena memperkuat dugaan negatif terhadap pihak lain secara terbuka.

#### **Data (21)**

##### **Konteks:**

Abdul Fickar menyoroti kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegakan hukum dalam proses penyelidikan yang tidak memiliki batas waktu.

##### **Tuturan:**

Fickar : “Jadi, artinya tidak seenaknya penegak hukum itu mengundang orang, gitu, ya. Padahal tidak ada ujungnya. Nah, di situ bisa terjadi politisasi. Di situ bisa jadi ada muatan politiknya, gitu, ya.”

Tuturan tersebut merupakan pelanggaran maksim simpati karena penutur tidak menunjukkan empati terhadap pihak yang dibicarakan, yaitu aparat penegak hukum. Ungkapan ”tidak seenaknya penegak hukum itu mengundang orang” dan

kemungkinan ”terjadi politisasi” memberi penilaian negatif terhadap cara kerja institusi hukum. Pernyataan ini cenderung menyudutkan aparat tanpa mempertimbangkan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum. Dengan demikian, tuturan ini melanggar maksim simpati karena tidak memaksimalkan sikap empati terhadap pihak lain, melainkan memperkuat penilaian negatif secara terbuka.

**Data (22)****Konteks:**

Abdul Fickar menyampaikan bahwa ketika peradilan menyatakan upaya paksa hukum tidak sah, maka boleh jadi tindakan tersebut dipolitisasi.

**Tuturan:**

Fickar: “Kalau praperadilan itu menyatakan bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan itu tidak sah, nah, itu boleh punya pikiran ‘Oh, ini pasti politisasi’, gitu, karena dilakukan serampangan sehingga menjadi tidak sah, gitu.”

Dalam tuturan di atas, Fickar menyampaikan bahwa seseorang boleh berpikir telah terjadi “politisasi” karena tindakan hukum dilakukan secara “serampangan”. Kata “serampangan” adalah diksi yang bersifat negatif, keras, dan tidak sopan, serta mengandung konotasi merendahkan kualitas profesionalisme aparat penegak hukum (dalam hal ini dapat merujuk ke KPK atau polisi). Dalam tuturannya, Fickar secara tidak langsung mengabaikan perasaan dan kehormatan institusi yang dimaksud, serta tidak ada bentuk empati atau kehati-hatian dalam memilih kata yang lebih netral atau sopan, padahal isu yang dibahas sangat sensitif dan menyangkut lembaga resmi negara sehingga tuturan tersebut dapat termasuk dalam pelanggaran maksim simpati.

**Data (29)****Konteks:**

Hendri Satrio beropini bahwa PDI-Perjuangan akan mengalami kemunduran pasca Jokowi keluar dari partai.

**Tuturan:**

Hendri: “Kalau sebuah partai politik tidak bisa mengajukan calon sebesar PDI-Perjuangan, maka konotasinya yang akan ada adalah PDI-Perjuangan jatuh pasca Jokowi menyeberang tidak lagi berada di PDI-Perjuangan dan apakah itu akan terus-menerus dilakukan seperti itu? Menurut saya, iya.”

Pada tuturan di atas, penutur menegaskan bahwa PDI-Perjuangan akan jatuh tanpa Jokowi. Hal tersebut tentu mengabaikan kapasitas institusional partai dan tidak menunjukkan sikap empatik terhadap tokoh dan kader lain dalam partai tersebut. Penutur menggunakan diksi “jatuh” yang sangat konfrontatif. Justru, narasi “jatuh” dibingkai sebagai sebuah “konotasi publik” yang dibiarkan menguat tanpa koreksi atau nuansa netral. Pilihan kata tersebut juga memperkuat kesan bahwa kondisi partai digambarkan secara pesimistis tanpa mempertimbangkan sudut pandang internal partai. Penutur tidak menunjukkan keprihatinan, bahkan tidak memberikan ruang bagi kemungkinan bangkit atau pulihnya partai sehingga tuturan tersebut dapat termasuk dalam pelanggaran maksim simpati.

**Data (31)****Konteks:**

Hendri Satrio menyampaikan opini bahwa konflik internal antara dua tokoh besar yang sedang diperbincangkan berkisar pada kepemilikan partai.

**Tuturan:**

Hendri: “Jadi, perseteruan antara Megawati dan Jokowi mungkin juga tentang bagaimana merebut trofi kepemilikan PDI-Perjuangan.”

Pada tuturan di atas, penutur mempersonalisasi konflik internal partai seolah-olah hanya sebatas perebutan kekuasaan pribadi. Penggunaan kalimat “rebut trofi kepemilikan” menyempitkan makna partai politik menjadi hanya sebatas alat perebutan kekuasaan pribadi, bukan sebagai lembaga yang dijalankan berdasarkan ideologi atau kesepakatan bersama. Tuturan tersebut mengabaikan rasa empati dan respek terhadap tokoh maupun institusi yang disebut. Penutur menampilkan konflik sebagai konsumsi publik tanpa memperlihatkan sensitivitas terhadap reputasi Megawati, Jokowi, maupun citra internal PDI-Perjuangan. Tidak ada upaya meredakan ketegangan atau mencari titik keselarasan dalam penyampaianya. Oleh

karena itu, tuturan tersebut jelas melanggar maksim simpati karena secara langsung menyerang rasa hormat, martabat, dan citra tokoh serta partai yang dibicarakan.

Berdasarkan data yang ditemukan, pelanggaran maksim simpati dalam penelitian ini ditandai oleh beberapa ciri utama, yaitu:

1. penyampaian dugaan atau tuduhan bernada negatif,
2. penggunaan diksi yang memperburuk citra pihak lain,
3. penonjolan kondisi yang melemahkan atau merugikan pihak yang dibicarakan, dan
4. penggambaran situasi tanpa menghadirkan sudut pandang yang empatik terhadap tokoh atau institusi yang dirujuk.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim simpati dalam data penelitian cenderung muncul melalui tuturan yang memperkuat jarak emosional terhadap pihak yang dibicarakan. Dalam konteks diskusi politik, tuturan semacam ini tidak hanya membangun penilaian negatif, tetapi juga memperlihatkan minimnya orientasi empatik terhadap tokoh, lembaga, atau kelompok yang menjadi objek pembicaraan.

#### **4.2 Fungsi Pelanggaran-Pelanggaran Kesantunan Berbahasa**

Pelanggaran kesantunan yang ditemukan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing” tidak hanya menunjukkan penyimpangan dari norma kesantunan berbahasa, tetapi juga memiliki fungsi tertentu dalam komunikasi politik. Dalam konteks diskusi yang bersifat argumentatif dan penuh kepentingan, pelanggaran kesantunan digunakan secara strategis oleh penutur untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Berdasarkan analisis data, fungsi pelanggaran kesantunan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut.

**Tabel 4.2** Fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club*

<b>Fungsi</b>	<b>Karakteristik Fungsi</b>	<b>Jumlah Data</b>
Menegaskan diri	penguatan posisi argumentatif dan otoritas penutur	8
Menunjukkan ketidakpuasan	kritik langsung dan ekspresi kekecewaan	14
Menunjukkan kekuasaan	penegasan dominasi dan relasi kuasa	4
Mendelegitimasi lawan	pelemahan citra dan legitimasi lawan	5
Membangun persepsi kritis dan ketegangan	dramatik, urgensi, dan intensifikasi konflik	8
Strategi penghindaran	pengalihan jawaban dan penghindaran pernyataan langsung	2
<b>Jumlah</b>		41

Berdasarkan Tabel 4.2, fungsi pelanggaran kesantunan berbahasa dalam penelitian ini menunjukkan adanya penggunaan strategi pragmatik dalam komunikasi politik. Adapun fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### 4.2.1 Menegaskan Diri

Pelanggaran kesantunan dalam bentuk ini digunakan oleh penutur untuk menegaskan posisi, pendapat, atau keyakinannya secara kuat di hadapan audiens. Tuturan seperti pada data (14) yang menyatakan bahwa tindakan Megawati didorong oleh rasa takut, dengan menggunakan diksi “makin ketakutan” dan “keserempet”, tanpa upaya untuk menggunakan ungkapan yang lebih halus. Meskipun ada kalimat “saya katakan barangkali”, pernyataan tersebut tetap menyiratkan penilaian pribadi yang kuat. Tuturan tersebut memperlihatkan posisi penutur seolah lebih memahami situasi dan ingin menegaskan pandangannya di ruang publik.

Demikian pula pada Data (15) penyebutan *fear arousing communications* menunjukkan bahwa penutur tidak sekadar mengkritik tuturan tokoh yang dibicarakan, tetapi juga menampilkan pembacaannya sendiri sebagai tafsir yang kuat dan meyakinkan. Penggunaan istilah itu membuat penutur terlihat sedang menegaskan sudut pandangnya atas motif komunikasi lawan politik. Sama halnya

dengan Data (20), penjelasan mengenai perbedaan penyidikan dan penyelidikan diakhiri dengan ungkapan "itu yang kadang-kadang orang tidak mengerti". Bagian ini menunjukkan bahwa penutur tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih memahami persoalan hukum dibanding orang lain. Dengan cara itu, fungsi tuturan bergeser menjadi penegasan posisi intelektual penutur di hadapan audiens.

Hal yang serupa tampak pada Data (24) melalui pernyataan "Dalam doktor saya..." yang secara langsung menghadirkan latar belakang akademik penutur sebagai dasar otoritas. Penyebutan itu memperkuat kesan bahwa pendapat yang disampaikan bukan sekadar opini biasa, tetapi pandangan yang ditopang oleh pengalaman keilmuan penutur sendiri. Lain halnya pada Data (6), fungsi menegaskan diri tidak muncul melalui penjelasan intelektual, melainkan melalui kutipan langsung yang ekspresif, yaitu "Eh! Lo Rossa!". Dalam konteks ini, penutur menampilkan respons Megawati sebagai respons yang tegas dan berani, sehingga posisi pihak yang dibelanya tampak lebih kuat dibanding pihak lain yang dibicarakan. Sedangkan pada Data (30), penegasan diri tampak melalui pembacaan politik penutur atas kondisi PDI-Perjuangan. Ungkapan "mulai dari hari ini dipereteli" menunjukkan bahwa penutur sedang menguatkan tafsir politiknya sendiri terhadap situasi yang sedang berlangsung, sehingga tuturan tersebut berfungsi memperkuat posisi argumentatif penutur di ruang diskusi.

Selain itu, pada Data (34) dengan pernyataan "tidak ada sendi-sendi republik ini yang tidak dipelintir", penutur menegaskan pandangan kritisnya terhadap kondisi pemerintahan secara menyeluruh. Bentuk generalisasi yang sangat luas itu membuat posisi penutur tampak tegas dan tidak ragu dalam menyampaikan penilaiannya. Sementara itu, pada Data (35), penegasan diri muncul ketika penutur merespons isu ancaman dengan mengatakan bahwa pihak yang dibicarakan "dia makan nasi juga" dan "dia juga punya rasa takut". Tuturan ini menunjukkan bahwa penutur ingin menolak citra ancaman dari lawan politik dan sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa pihak tersebut tidak sepenuhnya berada pada posisi yang lebih kuat.

Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam data-data tersebut berfungsi sebagai strategi untuk memperkuat posisi argumentatif dan menampilkan otoritas penutur dalam wacana.

#### 4.2.2 Menunjukkan Ketidakpuasan

Pelanggaran kesantunan juga digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap situasi, kebijakan, atau tindakan pihak tertentu. Pada data (1), istilah “*di-remote*” menunjukkan kritik keras terhadap independensi KPK. Penggunaan istilah tersebut membuat KPK digambarkan seolah tidak lagi berdiri secara mandiri, melainkan berada di bawah kendali pihak tertentu. Tuturan itu memperlihatkan ketidakpuasan penutur terhadap kondisi lembaga hukum yang dinilai telah dipengaruhi kekuatan di luar institusi.

Hal yang sama tampak pada Data (2) dan (3) ketika penutur menggunakan ungkapan seperti “diperiksa lagi entah siapa lagi”, “mencekal ajudannya”, dan “rekening banknya juga Cuma 400 ribu, 700 ribu”. Penggunaan rincian tersebut menunjukkan keberatan penutur terhadap proses hukum yang dianggap berlebihan dan tidak proporsional. Dalam konteks ini, penutur tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperlihatkan rasa tidak puas terhadap tindakan aparat hukum yang dinilai terlalu jauh menjangkau pihak-pihak tertentu.

Pada Data (4), pertanyaan retorik “urusannya apa?” menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan KPK. Pernyataan tersebut bukan sekadar meminta jawaban, tetapi menyiratkan keberatan terhadap langkah KPK yang dianggap “melebar lagi ke mana-mana”. Penggunaan repetisi “melebar” memperkuat kesan bahwa penutur memandang tindakan tersebut dilakukan secara berlebihan. Demikian pula pada Data (8), bentuk perbandingan “anggota DPRD-nya diambil semua, gubernurnya gak disentuh” menunjukkan dugaan adanya perlakuan hukum yang tidak seimbang. Penutur juga menggunakan ungkapan “*Wallahualam* benar apa tidak” sebagai bentuk pengantar, tetapi bagian setelahnya justru memperlihatkan ketidakpuasan terhadap proses penegakan hukum yang dianggap tidak adil.

Selain itu, pada Data (11), ungkapan “diminta tidak bicara”, “jangan terlalu keras”, “jangan begini”, dan “jangan begitu” menunjukkan adanya tekanan politik terhadap kader partai tertentu. Repetisi bentuk larangan tersebut memperkuat kesan bahwa terdapat pembatasan kebebasan berbicara di ruang publik. Tuturan ini tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memperlihatkan ketidakpuasan penutur terhadap situasi politik yang dianggap menekan pihak tertentu. Senada dengan itu, pada Data (16), pengulangan kata “bukan” dalam kalimat “KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan” menunjukkan bantahan yang sangat tegas terhadap klaim yang sedang dibahas. Bentuk penolakan tersebut memperlihatkan penutur terhadap narasi politik tertentu sehingga tuturan terasa lebih konfrontatif.

Hal serupa tampak pada Data (17), ungkapan “gak ada kabarnya lagi” menunjukkan kekecewaan terhadap proses hukum yang dinilai tidak transparan. Penggunaan bahasa informal dan bernada menyindir memperkuat kesan bahwa aparat hukum tidak bekerja secara jelas dan terbuka. Demikian pula pada Data (18), pernyataan “Saya, sih, gak setuju judulnya” dan “Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak” menunjukkan penolakan langsung terhadap narasi yang dibangun dalam diskusi. Tuturan tersebut memperlihatkan ketidakpuasan penutur terhadap framing konflik politik yang dianggap tidak sesuai dengan pandangannya. Sementara itu, pada Data (21), ungkapan “tidak seenaknya penegak hukum itu mengundang orang” dan kemungkinan “terjadi politasi” menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara kerja institusi hukum. Penggunaan diksi “tidak seenaknya” dan “politisasi” membangun penilaian negatif terhadap aparat penegak hukum karena tindakan yang dilakukan dianggap tidak netral.

Demikian pula pada Data (22), penggunaan kata “politisasi” dan “serampangan” menunjukkan kritik keras terhadap proses hukum yang dianggap tidak profesional. Diksi “serampangan” memiliki konotasi negatif sehingga memperkuat ekspresi ketidakpuasan penutur terhadap institusi yang dibicarakan. Hal yang serupa tampak pada Data (23) ketika penutur menyatakan bahwa aparat hukum “kerjanya main-main”. Ungkapan tersebut menunjukkan penilaian negatif terhadap proses penegakan hukum yang dianggap tidak serius dan tidak profesional. Sedangkan pada Data (29), ungkapan “PDI-Perjuangan jatuh pasca Jokowi

menyeberang” menunjukkan penilaian pesimis terhadap kondisi partai politik tertentu. Penggunaan kata “jatuh” membuat kritik terasa lebih tajam karena menggambarkan partai tersebut berada dalam kondisi lemah dan mengalami kemunduran.

Lain halnya dengan Data (38), ketidakpuasan ditunjukkan melalui ungkapan “tanpa berpikir” dan “sesuka-sukanya” yang secara langsung memberikan penilaian negatif terhadap kepemimpinan pihak yang dibicarakan. Penggunaan kedua ungkapan tersebut menggambarkan bahwa tindakan politik dilakukan secara sembarangan dan tidak mempertimbangkan dampaknya. Dalam konteks ini, pelanggaran kesantunan tidak hanya berfungsi menyampaikan kritik, tetapi juga memperlihatkan rasa kecewa yang sangat terbuka terhadap cara kekuasaan dijalankan. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam tuturan-tuturan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kritik dan ketidakpuasan secara langsung.

#### 4.2.3 Menunjukkan Kekuasaan

Dalam beberapa data, pelanggaran kesantunan digunakan untuk menunjukkan relasi kuasa dalam komunikasi. Pada Data (25), ungkapan “awas hati-hati” menunjukkan adanya posisi superior penutur dalam menjelaskan mekanisme hukum. Penekanan bahwa kekuasaan berada di tangan penegak hukum memperlihatkan relasi dominasi dalam komunikasi. Penggunaan ungkapan peringatan tersebut membuat pihak yang dibicarakan berada pada posisi yang lebih lemah karena digambarkan harus tunduk pada otoritas penegak hukum. Tuturan tersebut juga menunjukkan bahwa penutur menempatkan kekuasaan hukum sebagai sesuatu yang dapat memberi tekanan terhadap pihak lain.

Demikian pula pada Data (26), ungkapan “semua tidak ada yang berani” menunjukkan adanya dominasi kekuasaan tertentu dalam situasi politik yang sedang dibahas. Penggunaan kata “semua” membangun generalisasi bahwa tidak ada pihak yang mampu menentang kekuatan tersebut. Dengan cara itu, penutur memperlihatkan bahwa terdapat relasi kuasa yang membuat pihak lain berada dalam posisi takut atau tidak berdaya untuk menyampaikan perbedaan pendapat.

Hal yang serupa tampak pada Data (27) ketika penutur menyatakan bahwa “ketum-ketum parpol yang lain tunduk pada dirinya, pada diri Pak Jokowi”. Penggunaan kata “tunduk” menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak setara karena pihak lain digambarkan berada di bawah pengaruh tokoh tertentu. Diksi tersebut juga membangun kesan bahwa tokoh yang dibicarakan memiliki dominasi politik yang begitu kuat sehingga pihak lain tidak memiliki posisi yang setara dalam relasi politik tersebut.

Selain itu, pada Data (33), penggunaan kata “ditundukkan menggambarkan relasi kuasa antara tokoh politik, yang menunjukkan adanya pihak yang dominan dan pihak yang berada dalam posisi subordinat. Kata “ditundukkan” memiliki makna bahwa pihak tertentu tidak lagi berada dalam posisi setara, melainkan berada di bawah kendali pihak lain yang lebih kuat. Penggunaan diksi tersebut memperkuat kesan adanya kontrol dan dominasi dalam hubungan politik yang dibicarakan. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam konteks ini berfungsi untuk menegaskan struktur kekuasaan dan posisi dominasi dalam wacana politik.

#### 4.2.4 Mendelegitimasi Lawan

Salah satu fungsi utama pelanggaran kesantunan dalam data adalah untuk melemahkan atau mendelegitimasi pihak lain. Pada Data (39), ungkapan “*he’s nothing*” secara langsung merendahkan posisi tokoh yang dibicarakan. Penggunaan ungkapan tersebut tidak hanya menunjukkan penilaian negatif, tetapi juga menihilkan pengaruh dan arti penting tokoh tersebut dalam situasi politik yang sedang dibahas. Tuturan itu semakin mempertegas upaya penutur untuk melemahkan citra pihak yang dirujuk di hadapan audiens. Demikian pula pada Data (5), penggunaan frasa “dagelan hukum” menunjukkan upaya merendahkan proses hukum yang dilakukan pihak tertentu. Kata “dagelan” memiliki konotasi lelucon atas sesuatu yang tidak serius sehingga ketika dilekatkan pada proses hukum, tuturan tersebut membangun citra bahwa proses hukum tidak layak dipandang serius dan hanya menjadi permainan politik semata.

Hal yang serupa tampak pada Data (31) melalui ungkapan “merebut trofi kepemilikan PDI-Perjuangan”. Penggunaan metafora “trofi” menyempitkan makna

partai politik serolah hanya menjadi objek perebutan kekuasaan pribadi. Tuturan tersebut merendahkan citra tokoh maupun institusi politik yang dibicarakan karena konflik yang ada digambarkan hanya berkaitan dengan ambisi kekuasaan. Dalam konteks ini, pelanggaran kesantunan digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap pihak lawan di hadapan audiens.

Pada Data (28), Ungkapan “gak bisa diatur” memberikan penilaian negatif terhadap tokoh politik tertentu. Ungkapan tersebut menggambarkan pihak yang dibicarakan sebagai sosok yang sulit dikendalikan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan politik tertentu. Sementara itu, pada Data (32), metafora “mengibarkan bendera perang” menempatkan pihak tertentu sebagai pemicu konflik politik. Penggunaan metafora perang tersebut membuat pihak yang dibicarakan tampak agresif dan sengaja menciptakan ketegangan politik di ruang publik. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam tuturan-tuturan tersebut berfungsi sebagai strategi untuk melemahkan legitimasi dan citra pihak lawan dalam wacana politik.

#### 4.2.5 Membangun Persepsi Kritis dan Ketegangan

Pelanggaran kesantunan juga digunakan untuk membangun suasana tegang dan menciptakan persepsi kritis dalam diskusi. Pada Data (7), pengulangan kata “membahayakan” menunjukkan intensifikasi retorik yang menciptakan kesan bahwa situasi politik berada dalam kondisi darurat. Penggunaan ungkapan “nafsu angkara murka penguasa” juga memperkuat nuansa emosional dan konfrontatif sehingga audiens diarahkan untuk melihat situasi politik sebagai ancaman serius. Hal ini memperkuat emosi audiens dan meningkatkan perhatian terhadap isu yang dibahas.

Demikian pula pada Data (9), penggunaan ungkapan “*Republic of Fear*” membangun citra bahwa negara sedang berada dalam kondisi penuh ketakutan dan tekanan politik. Ungkapan tersebut memiliki konotasi yang sangat kuat karena menggambarkan keadaan politik sebagai situasi yang tidak sehat dan dipenuhi rasa takut. Hal yang serupa tampak pada Data (10) melalui ungkapan “*Republic of Fear* tadi sudah terjadi”, “tidak banyak lagi orang yang berani bersuara”, dan “mimpi

buruk ini berakhir”. Penggunaan metafora “mimpi buruk” memperkuat suasana dramatik sehingga audiens diarahkan untuk melihat keadaan politik sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan penuh tekanan.

Selain itu, pada Data (19), penggunaan label “*failed state*” dan “negara gagal” menunjukkan penilaian yang sangat ekstrem terhadap kondisi negara. Ungkapan tersebut tidak diarahkan pada satu kebijakan tertentu, tetapi pada keadaan negara secara keseluruhan sehingga menciptakan kesan bahwa sistem kenegaraan sedang berada dalam kondisi krisis. Penggunaan label tersebut memperkuat suasana tegang karena audiens diarahkan untuk memandang kondisi politik dan hukum sebagai keadaan yang gagal dan tidak stabil.

Hal yang serupa tampak pada Data (36) melalui ungkapan “Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati”, “Jokowi cemburu pada reputasi demokratis SBY”, dan “dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat”. Penggunaan kata “cemburu” dan “bingung sendiri” membangun citra bahwa tokoh yang dibicarakan sedang mengalami kegelisahan politik dan krisis legitimasi. Tuturan tersebut memperkuat suasana konflik personal antar tokoh politik dan membuat diskusi terasa lebih konfrontatif. Sementara itu, pada Data (37), pernyataan “semua itu tidak ada pada Jokowi” membangun kontras yang tajam antara Jokowi dengan Megawati dan SBY. Penggunaan kalimat tersebut memperkuat citra negatif terhadap Jokowi dan menciptakan suasana konfrontatif dalam diskusi politik.

Demikian pula pada Data (40), ungkapan “ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan”, “dia tahu siapa penjahatnya itu”, dan “*You are peanuts*” memperlihatkan intensitas konflik yang sangat tinggi. Penggunaan diksi “kejahatan” dan “penjahat” menciptakan kesan bahwa situasi politik dipenuhi penyimpangan serius, sedangkan ungkapan “*You are peanuts*” berfungsi merendahkan pihak yang dibicarakan secara terbuka. Lain halnya dengan Data (41), penggunaan ungkapan “anak kecil” dan “hanyalah membuat mebel” memperlihatkan serangan verbal yang bersifat personal. Tuturan tersebut tidak hanya membangun ketegangan dalam diskusi, Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam data tersebut berfungsi untuk membangun emosi, meningkatkan dramatisasi, dan menciptakan *sense of urgency* dalam komunikasi politik.

#### 4.2.6 Strategi Penghindaran

Selain bersifat konfrontatif, pelanggaran kesantunan juga dapat berfungsi sebagai strategi penghindaran. Pada Data (12), strategi penghindaran tampak melalui tuturan “Kalau abang sambungkan, tuh, dengan pernyataannya si Saut Situmorang soal *remote-meremote*, abang bisa menyimpulkan saya kira”. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa penutur tidak memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan Karni Ilyas mengenai alasan Megawati menemui Kapolri, bukan Ketua KPK. Penutur justru mengalihkan proses penarikan kesimpulan kepada lawan tutur melalui ungkapan “abang bisa menyimpulkan saya kira”. Dengan cara itu, penutur tetap menyampaikan arah tuduhan atau kecurigaan tertentu, tetapi tidak mengatakannya secara eksplisit. Strategi ini memperlihatkan adanya kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat terhadap isu politik yang sensitif sehingga penutur dapat menghindari tanggung jawab langsung atas kesimpulan yang muncul dari pembicaraan tersebut.

Demikian pula pada Data (13), ungkapan “Nah, itu kesimpulan abang, saya gak mengiyakan” menunjukkan bahwa penutur sengaja menjaga jarak dari kesimpulan yang disampaikan lawan tutur. Penutur tidak memberikan jawaban yang tegas, tetapi menggunakan bentuk penolakan tidak langsung untuk menghindari keterlibatan secara eksplisit dalam pernyataan yang berpotensi kontroversial. Strategi tersebut memperlihatkan kehati-hatian penutur dalam menjaga posisi di tengah diskusi politik yang sensitif. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam konteks ini tidak bersifat menyerang, tetapi berfungsi sebagai strategi komunikasi untuk mengelola risiko dalam penyampaian informasi.

Pelanggaran kesantunan yang ditemukan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* menunjukkan fungsi strategis, seperti mendelegitimasi lawan dan memperkuat posisi argumentatif. Fenomena ini memperkuat temuan Bataona dkk. (2025) yang menyatakan bahwa dalam konteks politik, pelanggaran kesantunan sering digunakan sebagai strategi retorik dalam membangun citra dan menyerang lawan politik. Bataona dkk. (2025) menegaskan bahwa pelanggaran kesantunan dalam wacana politik merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bersifat

persuasif dan ideologis. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Hasin dkk. (2020) yang menyatakan bahwa tuturan dalam acara televisi politik cenderung digunakan secara strategis untuk memengaruhi audiens. Dalam konteks *Indonesia Lawyers Club*, pelanggaran kesantunan yang dilakukan oleh penutur juga menunjukkan fungsi strategis dalam membangun posisi argumentatif.

Berdasarkan analisis, pelanggaran kesantunan dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* tidak hanya berfungsi sebagai penyimpangan dari norma komunikasi, tetapi juga sebagai strategi pragmatik yang memiliki berbagai fungsi, yaitu menegaskan diri, menunjukkan ketidakpuasan, menunjukkan kekuasaan, mendelegitimasi lawan, membangun persepsi kritis dan ketegangan, serta menghindari pernyataan langsung. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam wacana politik dapat dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi audiens, membangun posisi argumentatif, serta mengelola dinamika konflik dalam interaksi publik.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa serta menganalisis fungsi pragmatik dari pelanggaran tersebut dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* episode “Perseteruan Megawati Versus Jokowi Makin Runcing”. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan teori kesantunan Leech, ditemukan bahwa pelanggaran kesantunan dalam data penelitian didominasi oleh pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan. Pelanggaran ini ditandai oleh penggunaan bahasa yang berpotensi merugikan pihak lain, seperti diksi evaluatif negatif, pertanyaan retorik, generalisasi, serta penggunaan metafora dan hiperbola. Selain itu, pelanggaran juga ditemukan pada maksim pujian dan maksim kesepakatan, meskipun jumlahnya lebih terbatas.

Kedua, secara linguistik, pelanggaran kesantunan dalam tuturan para peserta diskusi ditandai oleh beberapa bentuk, antara lain penggunaan ekspresi evaluatif langsung, pengulangan (repetisi), generalisasi, serta penggunaan bahasa metaforis yang bersifat intensif. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa tuturan dalam wacana politik cenderung bersifat langsung, konfrontatif, dan argumentatif.

Ketiga, pelanggaran kesantunan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpangan dari norma komunikasi, tetapi juga memiliki fungsi pragmatik tertentu. Berdasarkan analisis, ditemukan beberapa fungsi utama, yaitu (1) menegaskan diri, (2) menunjukkan ketidakpuasan, (3) menunjukkan kekuasaan, (4) mendelegitimasi lawan, (5) membangun persepsi kritis atau ketegangan, (6) sebagai strategi penghindaran dalam komunikasi. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan dalam konteks diskusi politik digunakan secara strategis untuk memperkuat posisi argumentatif, memengaruhi audiens, serta mengelola dinamika konflik.

Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam wacana politik, khususnya dalam talkshow *Indonesia Lawyers Club* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidaksantunan dalam arti normatif, melainkan sebagai strategi komunikasi yang digunakan oleh penutur dalam menyampaikan kritik, membangun citra, dan memengaruhi persepsi publik.

## 5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut.

### 5.2.1 Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori kesantunan berbahasa, khususnya yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech, tidak hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran norma komunikasi, tetapi juga dapat dikembangkan untuk memahami fungsi strategis bahasa dalam konteks wacana yang bersifat konfliktual, seperti wacana politik. Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pelanggaran kesantunan tidak selalu menunjukkan kegagalan berbahasa, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi pragmatik yang digunakan secara sadar oleh penutur. Dengan demikian, kajian kesantunan berbahasa perlu dipahami tidak hanya dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam kerangka fungsional dan kontekstual.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penggunaan bahasa dalam diskusi publik, khususnya yang disiarkan melalui media massa seperti *Indonesia Lawyers Club*, memiliki dampak terhadap cara masyarakat memahami isu politik dan menilai tokoh publik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan dalam komunikasi politik sering digunakan sebagai strategi untuk menyampaikan kritik, memperkuat argumen, dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, masyarakat sebagai penonton diharapkan dapat lebih kritis dalam memahami tuturan yang disampaikan dalam diskusi publik, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikatif di balik penggunaan bahasa tersebut.

Bagi praktisi media dan peserta diskusi publik, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika komunikasi publik serta penggunaan bahasa sebagai alat untuk membangun wacana.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelanggaran kesantunan berbahasa dengan mengintegrasikan teori lain, seperti teori *impoliteness* atau analisis wacana kritis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fungsi bahasa dalam wacana politik.

Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan data dari berbagai program diskusi lain atau platform media yang berbeda untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai penggunaan bahasa dalam komunikasi publik.

Bagi peneliti di bidang pragmatik, disarankan untuk lebih memperhatikan aspek fungsi dan konteks dalam menganalisis pelanggaran kesantunan, sehingga tidak hanya menghasilkan deskripsi, tetapi juga interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena bahasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., & Pristiwati, R. 2019. Pelanggaran Prinsip Kesantunan Dalam Film Yowis Ben Karya Bayu Skak. *Jurnal Profesi Keguruan*, 5(2), 162–168. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpk/article/view/20320>
- Artha, D. N. B. 2020. Analisis Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Video “Keluarga Mak Beti” pada Channel YouTube Arif Muhammad. tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Jember: Jember.
- Bataona, E. Y. S., Sofyan, A., Hariyadi, E., Wibisono, B., & Asrumi. 2025. Strategi Debat Cawapres Indonesia Tahun 2024: Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dan Respon Publik. *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 26(2), 143–160. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/SEMIOTIKA/index>
- Cangara, H. 2019. Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers.
- Fairclough, N. 2013. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). Routledge.
- Ferrika, M. A. 2017. Prinsip Kerjasama dan Kesopanan pada Percakapan Cangkrukan di Angkringan Lingkungan Kampus Tegal Boto Kabupaten Jember. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Jember: Jember.
- Hasin, I., Sofyan, A., & Hariyadi, E. 2020. Strategi Tindak Tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional dalam Acara “Dua Arah” di Kompas TV. *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 21(1), 49–58. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/SEMIOTIKA/index>
- Indonesia Lawyers Club. 2024, 1 Agustus. Perseteruan Megawati versus Jokowi makin runcing // Mega ajak perang?. [Video]. YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=G9nx\\_V7Dw9k&t=41s](https://www.youtube.com/watch?v=G9nx_V7Dw9k&t=41s). [Diakses pada 3 Agustus 2024]
- Indrati, M. F. 2017. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius.
- Leech, G. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik (Terjemahan M.D.D Oka). Universitas Indonesia Press.
- Levinson, S. C. 2014. Pragmatik (Terjemahan Y.L Suyanto). Kanisius.
- Moleong, L. J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadar, F. X. 2009. Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Graha Ilmu.
- Narsiwi, R., & Ariyana. 2018. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kesantunan dan Prinsip Kerjasama pada Film Manusia Setengah Salmon. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v7i1.1615>

- Niyasari, D. ., Wibisono, B., & Hariyadi, E. 2015. Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Babebo Mangli Kabupaten Jember. *Publika Budaya*, 1(1), 1–15.
- Noeraeni, R. 2023. Analisis Kesantunan Berbahasa Politikus dalam Program Indonesia Lawyers Club di Tv One. *Educational Journal: General and Specific Research*, 3(1), 154–163. <https://repo.unisal.ac.id/id/eprint/62/>
- Paramitha, A., & Subandi, A. 2022. Transformasi Media Penyiaran: Migrasi Indonesia Lawyers Club (ILC) dari Televisi Terrestrial ke Media Digital YouTube. *Jurnal Kajian Media Dan Komunikasi*, 5(2), 112–125.
- Putri, S. W., Gani, E., & Syahrul, R. 2019. Penggunaan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Talk Show Mata Najwa Edisi “100 Hari Anies-Sandi Memerintah Jakarta.” *Lingua: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 15(1), 76–84. <https://doi.org/10.15294/lingua.v15i1.16728>
- Rahardi, K. 2005. Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia. Erlangga.
- Rustono. 2020. Pragmatik. Lakeisha.
- Sari, E. S. 2018. Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Acara Dua Arah Kompas TV. *Jurnal Sapala*, 5(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/22840>
- Sudaryanto. 2015. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Sanata Dharma University Press.
- Watts, R. J. 2003. Politeness. Cambridge University Press.
- Wijana, I. D. P. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Andi Offset.